

# LAPORAN KINERJA TAHUN 2024



**KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan rahmat Allah S.W.T, Kecamatan Kintap dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Kecamatan Kintap atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2024.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini memaparkan pencapaian kinerja Kecamatan Kecamatan Kintap Tahun 2024 yang merupakan hasil dari pengukuran kinerja dari perjanjian kinerja Tahun 2024 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian program/ kegagalan/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah dilakukan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kecamatan Kintap Tahun 2024 merupakan media pertanggungjawaban yang dikaitkan dengan Rencana Strategis RPD Kecamatan Kintap Tahun 2024-2026, hal ini merupakan wujud dari keinginan Pemerintah Kecamatan Kintap untuk dapat menyajikan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel dalam memenuhi harapan masyarakat yaitu terwujudnya Clean Government dan Good Governance.

Namun demikian disadari masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu terus ditingkatkan dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pengelolaan dan penataan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan prima terhadap masyarakat. Ucapan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kecamatan Kintap Tahun 2024.

Kintap, 16 Januari 2025



## RINGKASAN EKSEKUTIF



Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena atas perkenanNya Laporan Kinerja (LKj) Kecamatan Kintap Tahun 2024 telah diselesaikan. Laporan Kinerja ini disusun dalam rangka akuntabilitas kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Kintap Tahun 2024 yang didasari oleh:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Tata Reviu Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Laporan Kinerja Kecamatan Kintap masih belum sempurna, oleh karena masukan baik berupa saran maupun kritik yang membangun untuk penyempurnaan sangat kami harapkan dan semoga perbaikan laporan ini bermanfaat bagi semua pihak terutama untuk peningkatan kinerja Kecamatan Kintap untuk masa mendatang.

Akhirnya kami berharap semoga laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur peningkatan kinerja dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan yang berkelanjutan.

Kintap, 16 Januari 2025



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	
RINGKASAN EKSEKUTIF.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN.....	1
C. DASAR HUKUM.....	2
D. CASCADING KINERJA.....	3
E. PROSES BISNIS, TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	4
F. ISU STRATEGIS.....	19
G. PRODUK DAN LAYANAN.....	20
H. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN.....	20
I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA.....	23
J. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	27
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	28
A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA.....	28
B. PERJANJIAN KINERJA 2024.....	30
C. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA.....	33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	37
A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI.....	37
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	88
BAB IV PENUTUP.....	91
A. SIMPULAN.....	91
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
1. IKU	
2. POHON KINERJA	
3. PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA 2024	

#### 4. HASIL EVALUASI RENJA 2024

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah ASN/Non ASN Lingkup Kantor Kecamatan Kintap ..... 16
Tabel 2.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Kintap..... 17
Tabel 3.	Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Kintap..... 17
Tabel 4.	Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Kintap..... 18
Tabel 5.	Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 21
Tabel 6.	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023..... 24
Tabel 7.	Sasaran strategis Kantor Kecamatan Kintap..... 29
Tabel 8.	Tujuan dan Sasaran RPD Kecamatan Kintap..... 30
Tabel 9.	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap..... 30
Tabel 10.	Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 31
Tabel 11.	Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 34
Tabel 12.	Pengelompokan Capaian Kinerja..... 38
Tabel 13.	Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 39
Tabel 14.	Rekap nilai SAKIP provinsi Kal-Sel 2023-2024..... 39
Tabel 15.	Rekapitulasi Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Kal-Sel 2023-2024..... 39
Tabel 16.	Perbandingan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dan tahun 2024..... 40
Tabel 17.	Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 42
Tabel 18.	Tabel Mutu Pelayanan..... 45
Tabel 19.	Hasil Survei IKM Kecamatan Kintap Tahun 2024..... 46
Tabel 20.	Kategori Nilai AKIP Kecamatan Kintap..... 49
Tabel 21.	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kintap..... 49

Tabel 22.	Capaian SAKIP Tahun 2021-2024.....	49
Tabel 23.	Realisasi Sasaran Strategi dan IKU Kecamatan Kintap Tahun 2024.....	50
Tabel 24.	Realisasi Sasaran Strategi dan IKU Kecamatan Kintap tahun 2019 - 2024....	51
Tabel 25.	Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	53
Tabel 26.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024 .....	54
Tabel 27.	Sasaran Strategis , Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Kintap.....	54
Tabel 28.	Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kintap.....	55
Tabel 29.	Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat Kecamatan Kintap.....	55
Tabel 30.	Realisasi Program Penunjang pada Sekretariat Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	56
Tabel 31.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024 .....	57
Tabel 32.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2024.....	58
Tabel 33.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2024.....	58
Tabel 34.	Realisasi Program Penunjang pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	64
Tabel 35.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Seksi PMD Kecamatan Kintap Tahun 2024.....	64
Tabel 36.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2024.....	66
Tabel 37.	Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	69
Tabel 38.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kintap Tahun 2024.....	69
Tabel 39.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Keamanan dan Ketertiban TA. 2024.....	70
Tabel 40.	Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	74

Tabel 41.	Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap Tahun 2024.....	74
Tabel 42.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2024.....	75
Tabel 43.	Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024.....	76
Tabel 44.	Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian TA. 2024.....	78
Tabel 45.	Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024.....	80

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kintap.....	4
Gambar 2.	SK Desa Mandiri.....	44
Gambar 3.	Pengibaran Bendera Merah Putih dalam Rangka HUT RI ke 79 di Halaman kantor Kecamatan Kintap.....	55
Gambar 4.	Pelaksanaan Evaluasi APBDes di Kecamatan Kintap.....	62
Gambar 5.	BA Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa.....	63
Gambar 6.	Pelaksanaan Musrenbang di Kecamatan Jorong.....	63
Gambar 7.	Penyaluran Bantuan untuk Korban Banjir di Desa Kintapura.....	66
Gambar 8.	BA Serah Terima Bantuan Bencana Alam pada Kecamatan Kintap.....	67
Gambar 9.	Fasilitasi Bantuan Korban Terdampak Banjir Rob Desa Muara Kintap.....	68
Gambar 10.	BA dan SPTJM Penerima bantuan Pangan dan Penggantian Bantuan Pangan .....	68
Gambar 11.	Pelatihan LinMas Desa Se Kecamatan Kintap.....	71
Gambar 12.	Demo Masyarakat Desa Riam Adungan terkait Sengketa dengan PT Arutmin Indonesi ke DPRD Kab. Tanah Laut.....	71
Gambar 13.	Monitoring Pilkada Desa Kebun Raya.....	72
Gambar 14.	Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama.....	72
Gambar 15.	Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba.....	72
Gambar 16.	Pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN) Kantor Kecamatan Kintap.....	76
Gambar 17.	Pengadaan Printer dan Komputer.....	79

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2018-2023.....	44
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Kintap Tahun 2024 mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah.

### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud penyusunan Laporan Kinerja tahun 2024 ini adalah :

- a. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan dan kegagalan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2024
- b. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2024

Tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja adalah :

- a. Untuk pengambilan Keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan kearah perbaikan, untuk efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anggaran.
- b. Untuk perbaikan dan peningkatan kinerja Kecamatan Kintap di masa yang akan datang.

### **C. DASAR HUKUM**

LKjIP Kecamatan Kintap Tahun 2024 disusun berdasarkan peraturan

perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,

- Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ((Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang uraian tugas kecamatan;
  11. Peraturan Bupati Tanah laut No 50 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.
  12. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Tanah Laut tahun 2021 Nomor 114),

#### **D. CASCADING KINERJA**

Cascading Kinerja Kecamatan Kintap tahun 2024 digambarkan dalam bentuk urutan tingkatan berjenjang dari Tujuan, sasaran dan Indikator Esselon III sampai dengan Esselon IV dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Kintap memiliki 2 (dua) Tujuan Strategis dengan 2 (dua) Indikator Tujuan
2. Kecamatan Kintap memiliki 2 (dua) Sasaran Strategis Eselon III (Camat) dengan 3 (tiga) Indikator Sasaran Eselon III (Camat).
3. Kecamatan Kintap memiliki 1 (satu) Sasaran Strategis Eselon III (Sekretaris Camat) dengan 5 (lima) Indikator Sasaran Eselon III (Sekretaris Camat).
4. Kecamatan Kintap memiliki 21 (dua puluh satu) Sasaran Strategis Eselon IV dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Sasaran Eselon IV.

#### **E. Proses Bisnis, Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi**

Kecamatan Kintap belum memiliki peta bisnis. Kecamatan Kintap dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong, dengan mengubah Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan.

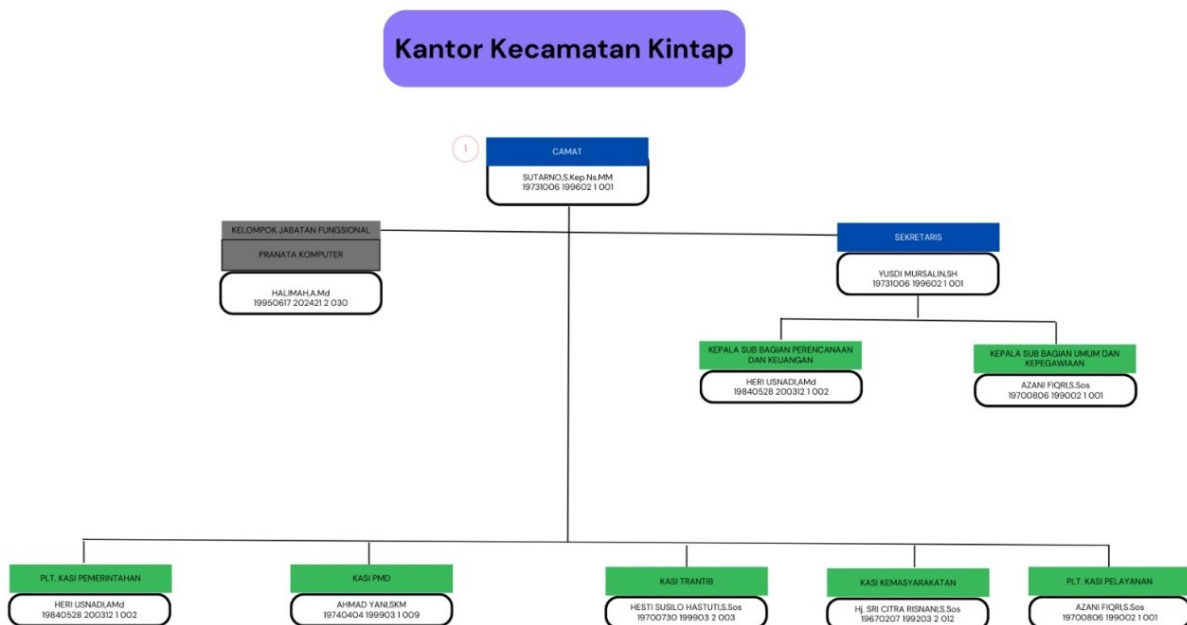
Struktur organisasi Kecamatan Kintap disusun berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Untuk melaksanakan tugas pokoknya Kecamatan Kintap disusun dengan struktur organisasi yang terdiri dari :

- 1) Camat
- 2) Sekretariat terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- 3) Plt. Seksi Tata Pemerintahan
- 4) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
- 5) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- 6) Seksi Kemasyarakatan
- 7) Plt. Seksi Pelayanan
- 8) Kelompok jabatan fungsional

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kintap dapat dilihat dilihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Kintap

Sekretariat kecamatan adalah unsur staf dan dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah Camat dan bertanggung jawab kepada Camat. Seksi-seksi pada kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah Camat

dan bertanggung jawab kepada Camat. Kelompok Jabatan Fungsional ditunjuk oleh Bupati atau pejabat lainnya sesuai dengan bidang keahliannya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 114 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten yang mempunyai wilayah-wilayah kerja dan dipimpin oleh Camat. Camat berkedudukan sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintah di wilayah kerjanya yang berada dibawah Bupati dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pada Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan di Kabupaten Tanah Laut, dimana Kecamatan adalah perangkat daerah yang bersifat kewilayahan yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah, untuk melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;
- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- p. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

Kecamatan Kintap untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dilengkapi dengan unsur-unsur organisasi, yang terdiri dari :

#### **1. Sekretariat**

Sekretariat Kecamatan Kintap dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan rencana kegiatan Kecamatan, mengelola urusan keuangan, mengelola urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan serta mengelola urusan administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran kecamatan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana strategis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan evaluasi dan pelaporan kegiatan kecamatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan Penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan aset kecamatan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan organisasi dan tata laksana;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina dan mengendalikan pengelolaan hubungan masyarakat dan protokol;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk melaksanakan tugas-tugas dan fungsi dimaksud Sekretariat Kecamatan Kintap dilengkapi dengan 2 (dua) Sub Bagian yaitu :

**1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan program dan rencana kegiatan keuangan dan mengelola keuangan serta menyiapkan laporan

pertanggungjawaban keuangan. Adapun uraian tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun program, rencana kegiatan anggaran kecamatan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
- d. menyiapkan bahan dan menyusun pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan;
- e. menyiapkan bahan dan menyusun satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, revisi anggaran;
- f. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik kecamatan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan kinerja, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- h. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan kegiatan rutin;
- j. melaksanakan urusan akuntansi dan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
- l. melaksanakan urusan gaji pegawai;
- m. melaksanakan administrasi keuangan;
- n. melaksanakan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
- o. melaksanakan penyusunan laporan keuangan dan laporan sejenis sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- p. melaksanakan penyiapan bahan pemantauan tindak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
- q. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas mengelola urusan surat menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta mengelola administrasi kepegawaian. Uraian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, rencana kegiatan dan anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan rencana kebutuhan dan usulan pengembangan pegawai;
- c. melaksanakan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- d. melaksanakan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
- e. melaksanakan urusan tata usaha kearsipan;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola data, dokumen dan informasi kepegawaian;
- h. menyiapkan bahan dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
- i. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;

- j. melaksanakan urusan kerjasama, hubungan masyarakat dan protokol;
- k. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- l. melaksanakan telaahan, penyiapan dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- n. melaksanakan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
- o. melaksanakan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahan barang;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

1.

**2. Seksi Tata Pemerintahan**

Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Tata Pemerintahan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mengolah data kegiatan penyelenggaraan pemerintahan umum tingkat kecamatan, desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan;
- d. melaksanakan sebagian tugas dalam hal pajak bumi dan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan tugas bidang pertanahan di kecamatan;
- f. melakukan penataan dan pengembangan wilayah kecamatan, desa dan kelurahan;
- g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi administrasi kependudukan;
- h. mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kependudukan di wilayah kecamatan;

- i. menyiapkan bahan dan memproses pelayanan administrasi kependudukan;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pembinaan dalam rangka peningkatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- k. mengoordinasikan kegiatan pengumpulan bahan dan fasilitasi penyelenggaraan pemilu lingkup kecamatan meliputi pemilihan kepala desa dan penjaringan aparatdesa;
- m. menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi instansi didaerah, fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada;
- n. mengoordinasikan persiapan dalam rangka pelaksanaan peringatan hari-hari besar nasional/daerah;
- o. menyiapkan bahan dan memfasilitasi perselisihan antar desa bidang pemerintahan;
- p. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Tata Pemerintahan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

### **3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Seksi Ketentraman dan Ketertiban dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban sebagai pedoman dan landasan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama dengan aparat penegak hukum lainnya dalam kegiatan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban masyarakat di wilayah kecamatan;
- e. mengolah dan memproses rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK);

- f. menyiapkan bahan, memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- g. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang ketentraman dan ketertiban;
- h. menyiapkan bahan materi penyuluhan mengenai ketentraman dan ketertiban umum di lingkungan wilayah Kecamatan;
- i. melaksanakan pengawasan perizinan di kecamatan;
- j. mengolah dan memproses surat ijin penutupan jalan tertentu, ijin parkir tidak tetap, surat jalan dan surat keterangan lainnya yang menjadi kewenangannya;
- k. memberdayakan potensi perlindungan masyarakat;
- l. melaksanakan tugas pembantuan operasional yang berkaitan dengan:
  - 1) Penanggulangan bencana.
  - 2) Penertiban terhadap gelandangan, pengemis dan penyandang masalah sosial lainnya.
  - 3) Penertiban dan pencegahan terhadap penyakit masyarakat (pekat).
  - 4) Melakukan pengamanan terhadap kejadian kebakaran, orang bunuh diri, kecelakaan, kematian yang tidak sewajarnya dan penemuan mayat
  - 5) Memantau dan membina pelaksanaan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan;
- n. melaksanakan pengawasan dan memantau penyelenggaraan pertunjukan dan keramaian kampung;
- o. melaksanakan pembinaan dan pengawasan ketentraman lingkungan dan melakukan kegiatan pengamanan wilayah;
- p. mengawasi pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
- q. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan

- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

- 1.
- 2.
- 3.

#### 4. **Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Kelurahan**

Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan uraian tugasnya adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyusun dan melaporkan data monografi kecamatan serta profil desa dan kelurahan;
- c. menyiapkan bahan perumusan rencana pembangunan kecamatan (musrenbang);
- d. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pelaporan kegiatan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- g. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyuluhan usaha kecil, mikro dan menengah kepada masyarakat lingkup kecamatan;
- h. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan desa;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan swadaya dan pemberdayaan masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi pembinaan dan pengembangan kegiatan perekonomian;
- k. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi Daerah di wilayah kecamatan;
- l. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama antar desa dan penyelesaian perselisihan antar desa bidang perekonomian, pemberdayaan masyarakat dan Desa;

- m. menyiapkan bahan dan menyelenggaraan lomba/penilaian desa/kelurahan tingkat kecamatan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **5. Seksi Kemasyarakatan**

Seksi Kemasyarakatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyusun program kerja Seksi Kemasyarakatan berdasarkan petunjuk teknis dan ketentuan sebagai pedoman kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan menyusun petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kesejahteraan rakyat;
- c. menyiapkan bahan dan memproses rekomendasi perizinan dalam bidang kemasyarakatan;
- d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan pendidikan, generasi muda, keolahragaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;
- e. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan pembinaan kemasyarakatan;
- f. menyusun program kerja pelaksanaan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, peranan wanita, pembinaan kepemudaan serta olah raga termasuk pengentasan kemiskinan;
- g. mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyaluran bantuan social terhadap bencana alam dan bencana lainnya;
- h. mengumpulkan, mengolah, menganalisa dan menyajikan data kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan;
- i. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pembinaan lembaga adat dan komunitas adat terpencil serta organisasi sosial/kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
- j. menyiapkan bahan dan memfasilitasi penanggulangan masalah sosial, pencegahan dan penanggulangan bencana dan pengungsi;

- k. menyiapkan bahan dan memfasilitasi kegiatan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan program pengembangan dan peningkatan kesehatan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keluarga berencana;
- l. mengkoordinasikan kegiatan pengawasan, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan NAPZA (narkotika, psikotropika, zat aditif) obat dan bahan berbahaya lainnya;
- m. mengkoordinasikan dan memfasilitasi pembinaan dan pengembangan ketenagakerjaan dan perburuhan;
- n. melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kemasyarakatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

## **6. Seksi Pelayanan**

Seksi Pelayanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan mempunyai tugas adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun program, mengatur, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pelayanan sesuai prosedur untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pelayanan;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah dan instansi lainnya yang berkaitan dengan pembinaan pelayanan di wilayah Kecamatan;
- d. menyelenggarakan pelayanan administrasi kecamatan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan inovasi-inovasi pelayanan;
- f. memeriksa dokumen/berkas pemohon pelayanan administrasi kecamatan;
- g. menyusun dan mengevaluasi laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- h. mengadministrasikan pelayanan penyelenggaraan pelayanan administrasi kecamatan;
- i. Menyerahkan dokumen layanan administrasi kecamatan;
- j. Mengumpulkan, mengolah, mengalisis dan menyajikan data dan informasi pelayanan administrasi kecamatan;

- k. Melaksanakan administrasi, fasilitasi dan upaya pemecahan masalah pengaduan, informasi, dan konsultasi layanan administrasi kecamatan;
- l. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pelayanan; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan lainnya, Kecamatan Kintap didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana penunjang operasional kantor. Jumlah Pegawai Lingkup Kantor Kecamatan Kintap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang terdiri dari 12 (dua belas) orang ASN dan 9 (sembilan) orang PTT (non ASN). Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Daftar Jabatan, Esselon , Status Kepegawaian Dan Jumlah ASN/Non ASN Lingkup Kantor Kecamatan Kintap

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jumlah
			ASN	Non ASN	
1.	Camat	III.a	1	0	1
2.	Sekretaris	III.b	1	0	1
3.	a. Kasubbag Umum dan Kepegawaian	IV.b	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	5	6
	b. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	IV.b	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		3	1	4
4.	Kasi Tata Pemerintahan	IV.a	0	0	0
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0	0	0
5.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	IV.a	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0	0	0
6.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	IV.a	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		1	0	1
7.	Kasi Kemasyarakatan	IV.a	1	0	1
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0	1	1
8.	Kasi Pelayanan	IV.a	0	0	0
	- Jabatan Fungsional Umum (JFU)		0	2	2
<b>JUMLAH</b>			<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat kondisi kepegawaian berdasarkan pangkat dan golongan lingkup kantor Kecamatan Kintap untuk golongan IV sebanyak 1 (satu) orang, Golongan III sebanyak 6 (enam) orang, golongan II sebanyak 3 (orang) orang. Golongan I sebanyak 0 (nol) orang dan golongan VII PPPK sebanyak 1 (satu) orang. Adapun lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat dan golongan Lingkup Kantor Kecamatan Kintap

NO	Jenis Pangkat	Golongan/Ruang	JUMLAH
1.	Pembina Utama	IV/e	-
2.	Pembina Utama Madya	IV/d	-
3.	Pembina utama Muda	IV/c	-
4.	Pembina Tk. I	IV/b	1
5.	Pembina	IV/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>
6.	Penata Tk.I	III/d	5
7.	Penata	III/c	-
8.	Penata Muda Tk.I	III/b	-
9.	Penata Muda	III/a	1
		<b>JUMLAH</b>	<b>6</b>
10.	Pengatur Tk.I	II/d	-
11.	Pengatur	II/c	2
12.	Pengatur Muda Tk.I	II/b	1
13.	Pengatur Muda	II/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>2</b>
13.	Juru Tk.I	I/d	-
14.	Juru	I/c	-
15.	Juru Muda Tk.I	I/b	-
16.	Juru Muda	I/a	-
		<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>
17	Golongan VII (PPPK)	<b>VII</b>	<b>1</b>
		<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>
		<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>12</b>

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Jenjang pendidikan pegawai kantor Kecamatan Kintap untuk jenjang pendidikan sekolah dasar sebanyak 1 (satu) orang, Jenjang SLTA/SMK sebanyak 5 (orang) orang, Jenjang D3 sebanyak 4 (empat) orang, jenjang S1 sebanyak 8 (delapan) orang dan master/pasca sarjana (S2) sebanyak 2 (dua) orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Daftar Jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan Lingkup Kantor Kecamatan Kintap

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah		
		ASN	Non ASN / PTT	Jumlah
1.	Tidak Berjazah	-	1	1
2.	Sekolah Dasar	-	1	1
3.	SLTP	-	1	1
4.	SLTA/SMK	3	2	5
5.	D.1	-	-	-
6.	D.2	-	-	-

7.	D.3	3	1	4
8.	D.4	-	-	-
9.	Sarjana (S-1)	5	3	8
10.	Pasca sarjana/Master (S-2)	1	-	1
11.	Doktor (S-3)	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>12</b>	<b>9</b>	<b>21</b>

Sumber : Data Kasubbag Umpeg Kecamatan Kintap

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Kecamatan Kintap didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

Tabel 4. Daftar Jenis, Jumlah dan Kondisi Sarana Prasarana Lingkup Kantor Kecamatan Kintap

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
1.	Pompa air	2	2		
2.	Jeep (Toyota Rush Mobil Dinas Camat)	1	1		
3.	Mini bus	1	1		
4.	Sepeda motor	5	5		
5.	Global positioning system	1	1		
6.	Lemari kayu	7			
7.	Filing cabinet besi	5	5		
8.	Brandkas	1	1		
9.	Lemari makan	1	2		
10.	Alat penyimpanan kantor lainnya	1	2		
11.	Meja kerja kayu	7	7		
12.	Meja rapat	10	10		
13.	Kursi tamu	4	4		
14.	Kursi putar	10	10		
15.	Bangku tunggu	10	8	2	
16.	Meja komputer	4	4		
17.	Sofa	4	4		
18.	Mesin pemotong rumput	1	1		
19.	Lemari es	5	5		
20.	AC split	12	9	3	
21.	Kipas angin	6	6		
22.	Kitchen set	2	2		
23.	Treng air/tandon air	1	1		
24.	Televisi	3	3		
25.	Loudspeaker	2	2		
26.	Sound system	1	1		
27.	Tiang bendera	1	1		
28.	Dispenser	1	1		
29.	Alat pemadam/portable	1	1		

No.	Jenis Barang>Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	2	3	4	5	6
30.	Audio mixing stationer	1	1		
31.	Microphone/boom stand	2	2		
32.	Power amplifier	1	1		
33.	Camera electronic	1			
34.	Layar film/projector	3	3		
35.	Handy talky HT	4	4		
36.	Peralatan penerima lainnya	1	1		
37.	Genset	2	2		
38.	P.C Unit	6	6		
39	Lap top	6	6		
40.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	9	8	1	
41.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1		
42.	External/ Portable Hardisk	1	1		
43.	Tenda	2	2		
	Total	150 unit	146	4	

Sumber : SIMDA BMD 2024 Kec.Kintap

## F. ISU STRATEGIS

Dalam penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan dapat diidentifikasi beberapa tantangan yang dijumpai antara lain:

1. Konflik Agraria
2. Penciptaan lapangan kerja
3. Krisis Air Bersih
4. Penambahan Bangunan Infrastruktur Jalan
5. Berkurangnya lahan pertanian
6. Kurang produktifnya lahan perikanan dan perkebunan
7. Penurunan Stunting
8. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Kintap dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan kintap tahun anggaran 2024, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan

Kintap yaitu:

- a. Mengusulkan penambahan staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Kintap disamping itu pada tahun anggaran 2024 ini ada 2 orang yang memasuki purna tugas (pensiun).
- b. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi, bimbingan teknis dan pembinaan secara lebih intensif.
- c. Mengusulkan anggaran yang secara rasional dan proporsional sehingga dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana serta untuk melaksanakan semua jenis kegiatan.

## **G. PRODUK DAN LAYANAN**

Kecamatan Kintap menerbitkan beberapa produk layanan yang didasari oleh:

1. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017;
2. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2013 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
3. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 180 Tahun 2015;
4. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan Pemberian dan Pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat dalam Wilayah Kabupaten Tanah Laut.

Adapun jenis layanan tersebut terdiri dari:

1. Pelayanan pembuatan rekomendasi
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP elektronik
3. Pelayanan pembuatan Kartu Keluarga (KK)
4. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Domisili
6. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
7. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
8. Pelayanan Legalisasi Surat Izin Keramaian
9. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
10. Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Usaha
11. Pelayanan Legalisasi Permohonan SKCK
12. Pelayanan Legalisasi surat lainnya

## H. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA DAN ANGGARAN

Untuk mendukung tercapainya pencapaian kinerja organisasi, Kecamatan Kintap didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta anggaran yang dijelaskan pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Dukungan SDM, Sarana Prasarana Dan Anggaran pada Kecamatan Kintap Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal kecamatan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.473.092	6.367.200	98,36%	5 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674	3.341.600	96,14%	5 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
			Administrasi Keuangan Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.919.259	1.920.057.928	79,70%	5 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
				Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.470.059	3.318.000	95,61%	5 Orang	Sub Bag Perencanaan & Keuangan
			Administrasi Kepegawian Perangkat daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000	7.909.000	91,34%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawain
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303	5.343.340	88,29%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawain
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.453.007 <sup>3</sup>	28.839.660	88,86%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawain
				Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	20.000.000	100%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawain
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.120.000 <sup>27</sup>	270.817.081	97,72%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawain
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Pengadaan Mebel	4.890.491	4.171.603	85,30%	6 Orang
Pengadaan Peralatan dan	57.569.859	54.545.000	94,74%		6 Orang	Sub Bag Umum &			

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	SDM	KET	
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik		Daerah	Mesin Lainnya					Kepegawaian	
				Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	83.770.510	57.580.870	68,73%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	46.220.453	40.531.414	87,69%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	23 2.899.732	231.105.008	99,22%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.971.800	99,92%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	47.500.000	47.088.475	99,13%	6 Orang	Sub Bag Umum & Perlengkapan
					Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 1.600.000	10.450.000	90,08%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
					Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086	3.125.000	93,98%	6 Orang	Sub Bag Umum & Kepegawaian
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah	2 5.638.000	23.715.000	92,49%	1 Orang	Seksi Ketentraman & Ketertiban

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp.)	Realisasi Anggaran (Rp.)	%	SDM	KET
				Kecamatan					
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	99.172.460	80.969.000	81,64%	1 Orang	Seksi Keamanan dan ketertiban
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	648.676.375	633.980.750	97,73%	2 Orang	Seksi Kemasyarakatan
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	40.600.000	30.635.000	75,45%	1 Orang	Seksi Ketentraman & Ketertiban
				Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	12.880.000	12.600.000	97,82%
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan	5.075.000	4.725.000	93,10%	2 Orang	Seksi PMD

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	SDM	KET
				Pembangunan Desa					

Sumber : LRA 2024 Kec Kintap

## I. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN SEBELUMNYA

Tabel 6. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

## TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP SKPD TAHUN 2023

SKPD KECAMATAN KINTAP

Nomor	Rekomendasi	Rencana Aksi	Status / Progres Penyelesaian	Keterangan
<b>a.</b>	<b>Perencanaan Kinerja</b>			
1)	Agar dilakukan penyesuaian dokumen perencanaan kinerja, yaitu pada tujuan, sasaran, indikator dan target	penyesuaian antar dokumen perencanaan kinerja, yaitu pada tujuan, sasaran, indikator dan target sudah dilakukan	Selesai	Link Google Drive
2)	Agar melakukan pengadministrasian secara lengkap (hardcopy dan softcopy) terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja	pengadministrasian secara lengkap (hardcopy dan softcopy) terhadap seluruh dokumen perencanaan kinerja Sudah dilakukan	Selesai	Link Google Drive
3)	Agar dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras dipublikasi secara tepat waktu pada website SKPD atau website PPID	dokumen perencanaan kinerja yang telah selaras sedang diproses dan dipublikasi pada website SKPD atau website PPID	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive
4)	Terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang telah diselaraskan agar dipertahankan dan bila perlu dilakukan evaluasi berkala sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk penyempurnaan dan perbaikan pencapaian kinerja	Dokumen perencanaan kinerja yang telah diselaraskan telah dipertahankan dan dievaluasi secara berkala	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive
<b>b.</b>	<b>Pengukuran Kinerja</b>			
5)	Agar melakukan Pengukuran kinerja secara berkala, berjenjang pada unit dibawahnya dan terdokumentasi, sehingga akan diketahui kendala kendala dalam pencapaian target kinerja dan dijadikan sebagai dasar acuan perbaikan kinerja	pengukuran kinerja secara berkala dan berjenjang pada unit kerja di bawahnya telah dilakukan dan terdokumentasi	Penguatan Bukti Dukung	Link Google Drive

6)	Agar dapat menggunakan data kinerja yang andal, relevan dan valid / dapat ditelusuri sumber datanya untuk mengukur capaian kinerjanya	Data data kinerja yang digunakan cukup valid untuk ditelusuri sumber datanya untuk mengukur capaian kinerja	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive
<b>c.</b>	<b>Pelaporan Kinerja</b>			
7)	Agar dokumen laporan kinerja dilaporkan tepat waktu dan melakukan pengadministrasian secara lengkap ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ) terhadap dokumen pelaporan kinerja dan melakukan publikasi pada <i>website</i> SKPD atau <i>Website</i> PPID	Dokumen Laporan Kinerja sedang diusahakan untuk dilaporkan tepat waktu dan melakukan pengadministrasian secara lengkap ( <i>hardcopy</i> dan <i>softcopy</i> ) terhadap dokumen pelaporan kinerja dan dan proses publikasi mulai dilakukan secara bertahap pada <i>website</i> SKPD atau <i>website</i> PPID.	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive
8)	agar dalam penyusunan laporan kinerja memperhatikan standar penyusunan laporan kinerja sehingga laporan kinerja sesuai standar dan berkualitas			
P	Agar Laporan Kinerja menyajikan sekuruh informasi tentang capaian kinerja mulai dari :	Penyusunan laporan kinerjaTelah memperhatikan dan mengikuti standar penyusunan laporan kinerja sehingga laporan kinerja sesuai standar dan berkualitas	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive
a.	Data capaian kinerja tahun bersangkutan pada setiap sasaran strategis		Ada	LKj Bab III
b.	Data Perbandingan capaian tahun tahun sebelumnya selama periode renstra		Ada	LKj Bab III

c.	Data yang menginformasikan analisis dan evaluasi realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level kabupaten atau antar kecamatan.		Ada	LKj Bab III
d.	Data yang menginformasikan efisiensi penggunaan sumberdaya dalam mencapai kinerja		Ada	LKj Bab III
e.	Informasi keberhasilan / kegagalan, upaya nyata yang telah dilakukan dan upaya perbaikan kedepan pada setiap sasaran strategis		Ada	LKj Bab III
10)	Agar informasi dalam laporan kinerja menjadi perhatian pimpinan dan melakukan internalisasi terhadap seluruh pegawai untuk mendukung capaian kinerja melalui perubahan budaya kinerja organisasi.	Informasi dalam laporan kinerja telah menjadi perhatian Camat Kintap dan melakukan internalisasi terhadap seluruh pegawai untuk mendukung capaian kinerja melalui perubahan budaya kinerja organisasi disampaikan pada rapat evaluasi triwulan dan apel pagi	Ada	LKj Bab III
<b>d.</b>	<b>Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal</b>			
11)	Agar memperhatikan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk melakukan evaluasi AKIP Internal SKPD, termasuk SDM yang memadai baik secara proporsi Tugas pokok fungsi maupun Kompetensinya.	Telah dilakukan evaluasi dan perhitungan sumber daya apa saja yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan proporsi, tugas pokok dan fungsi	Sudah dibuatkan Tabel Perhitungan Sumber Daya Yang diperlukan	Link Google Drive
12)	Agar Menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil Evaluasi AKIP sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan nilai hasil evaluasi yang akan datang	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi AKIP telah diupayakan untuk ditindaklanjuti	Masih Dalam Proses Penyempurnaan	Link Google Drive Sakuntala

## **J. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Dalam pembuatan Laporan Kinerja Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut untuk Tahun 2024 ini tim penyusun membagi dalam beberapa pokok bahasan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

**BAB I PENDAHULUAN**

Memaparkan tentang latar belakang penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Kintap, menggambarkan maksud dan tujuan, dasar hukum, cascading kinerja, tugas pokok fungsi dan struktur organisasi Kecamatan Kintap.

**BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

Memaparkan tentang Renstra Kecamatan Kintap yang meliputi Visi, Misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan instrument pendukung capaian kinerja

**BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menyajikan tentang capaian kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan serta ringkasan anggaran dan realisasi berdasarkan program dan kegiatan

**BAB IV PENUTUP**

Menampilkan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dimasa mendatang untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGI DAN INDIKATOR KINERJA

Tujuan dan Sasaran Kabupaten Tanah Laut yang menjadi sasaran strategis Kecamatan Kintap beserta indikator dan target kinerjanya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 7. Sasaran strategis Kantor Kecamatan Kintap

NO.	TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPD		TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN			KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPD
				Realisasi 2023	Proyeksi 2024	2024	2025	2026	
1	2		4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan desa	Indeks Desa	Nilai	-	0,74	0,74	0,75	0,76	0,76
	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Rasio	-	0,35	0,021	0,35	0,42	0,42
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	88,64	88,79	90	91	92	92
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai SAKIP Kabupaten	Nilai	B	70,16(BB)	70,16(BB)	75,00(BB)	77,00 (BB)	80,00(A)
	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	Nilai	67,3	70	70	76	77	77

Sumber : Renstra RPD 2024-2026 Kecamatan Kintap

Pernyataan tujuan Kecamatan Kintap diatas mengandung makna adanya tekad yang kuat untuk menjadikan Kecamatan Kintap handal dan profesional dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, karena bukan pekerjaan mudah untuk mencapai kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LKj 2024 berdasarkan pada pohon kinerja hasil desk dengan Kemenpan&RB. Setelah ditetapkan Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan adalah disusunnya program dan kegiatan sebagai langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi. Program dan kegiatan yang disusun tentulah harus sesuai dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Kecamatan Kintap, dalam rangka menjawab tantangan/permasalahan dan isu-isu strategis sebagaimana telah

dirumuskan. Visi Kepala Daerah sebagaimana tersebut diatas agar bisa diwujudkan harus dituangkan dan dirinci ke dalam misi Kepala Daerah yang ditetapkan untuk Kecamatan Kintap harus menetapkan tujuan dan sasaran strategis sebagai gambaran aktivitas yang akan dilaksanakan.

Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja, baik untuk pengelolaan maupun pengendalian kegiatan. Sehingga pelaksanaan kegiatan dalam pembangunan lebih terarah dan terukur, jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Berdasarkan Formulir Tujuan, Indikator Tujuan, Target, Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Kecamatan Kintap menentukan 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama dalam mengukur keberhasilan kinerja kecamatan yaitu, Rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik yang ada di Kecamatan dan Nilai SAKIP Kec. Kintap untuk lebih jelasnya dapat dilihat dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 8. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	1	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada Dikali 100	Kecamatan
		2	Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap	1	Nilai SAKIP Kec.Kintap	Hasil Evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap	

Sumber : IKU E-Sakip 2024

Kinerja Utama/Tujuan/Sasaran Strategi Kecamatan Kintap Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan meliputi jumlah desa mandiri dibagi jumlah desa yang ada di kecamatan, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meliputi pengukuran terhadap tingkat kepuasan terhadap pelayanan umum yang diberikan kepada masyarakat dengan penanggung jawab Seksi Pelayanan, Seksi PMD, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, Seksi Tata Pemerintahan, Seksi Kemasyarakatan. Dan nilai AKIP Kecamatan Kintap didapatkan dari hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah, untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja mengandung arti bahwa instansi pemerintah harus merencanakan apa yang akan dilaksanakan (program, kegiatan) dan apa hasilnya (*outcome, output*). Perencanaan kinerja sesungguhnya tidak saja merencanakan apa yang akan dikerjakan, akan tetapi sekaligus menetapkan target (*quantitative objective*) hasil yang ingin dicapai.

Oleh karena itu, perencanaan kinerja yang baik akan sangat tergantung dari pengumpulan data pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya, pemetaan sumber daya/kekuatan yang ada dan ketepatan penentuan asumsi-asumsi ataupun prognosis/proyeksi ke depan.

Perjanjian Kinerja Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024 yang telah disepakati baik oleh Camat, Pejabat Eselon III dan Pejabat Eselon IV, adalah sebagai berikut :

Tabel 10. Perjanjian Kinerja Seluruh Pejabat Struktural, baik Eselon II, Eselon III dan Eselon IV Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Camat :</b>				
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,35	4 program/ 10 kegiatan / 24 sub Kegiatan	Rp. 4.123.438.360,-
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	70		
<b>Sekcam :</b>				
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai Komponen Perencanaan	24	1 Program / 7 Kegiatan / 18 sub kegiatan	Rp. 3.291.396.525
	Nilai Komponen Pengukuran	24		
	Nilai Komponen Pelaporan	12		
	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20		
	Hasil Survei pelayanan (IKM)	90		
<b>Kasubbag Umpeg :</b>				
Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	1 program / 4 kegiatan / 10 sub kegiatan	Rp. 769.633.355,-
Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat	100%		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
	daerah			
Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	100%		
Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%		
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12		
<b>Kasubbag Perencanaan dan Keuangan :</b>				
Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	1 program / 3 kegiatan / 8 sub kegiatan	Rp. 2.521.763.170,-
Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%		
<b>Kasi Tata Pemerintahan :</b>				
Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang tertib administrasi	100%		
Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 orang	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. ,-
<b>Kasi PMD :</b>				
Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDesa yang operasionalnya berjalan baik	100%		
Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Program / 1 Kegiatan / 2 Sub Kegiatan	Rp. 17.955.000-
Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen		
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 dokumen		

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN
<b>Kasi Kemasyarakatan :</b>				
Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	1 program / 1 kegiatan / 1 sub kegiatan	Rp. 648.676.375,-
Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan sosial	Jumlah koordinasi penyaluran bantuan sosial	2 kali		
<b>Kasi Trantib :</b>				
Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	1 kejadian	2 program / 2 kegiatan / 3 sub kegiatan	Rp. 165.410.460,-
Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan		
Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah laporan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	8 laporan		
<b>Kasi Pelayanan :</b>				
Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	0 program / 0 kegiatan / 0 sub kegiatan	Rp. 0,-
Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan		

Sumber : Berdasarkan Pohon Kinerja Kecamatan Kintap tahun 2024

Kinerja yang akan dicapai untuk satu tahun anggaran 2024 yang telah tergambar dalam Pohon Kinerja dan Cascading Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024 itulah yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja SKPD Kecamatan Kintap Tahun 2024.

### C. INSTRUMEN PENDUKUNG CAPAIAN KINERJA

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kintap pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam rangka mencapai sasaran strategis dan target yang ditetapkan dalam Perjanjian/Penetapan kinerja Tahun 2024, melaksanakan 4 Program, 10 Kegiatan, dan 24 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran dengan rincian adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Anggaran Penunjang Sasaran Strategis Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Meningkatnya akuntabilitas	Program Penunjang	Perencanaan, Penganggaran	Penyusunan Dokumen	6.473.092	6.367.200	98,36%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
	kinerja internal kecamatan	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	dan Evaluasi	Perencanaan Perangkat Daerah				
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674	3.341.600	96,14%	
			Administrasi Keuangan Daerah		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.919.259	1.920.057.928	79,70%
					Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.470.059	3.318.000	95,61%
			Administrasi Kepegawian Perangkat daerah		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000	7.909.000	91,34%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303	5.343.340	88,29%
					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	2.453.007 <sup>3</sup>	28.839.660	88,86%
					Penyediaan Bahan/Material	20.000.000	20.000.000	100%
					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7.120.000 <sup>27</sup>	270.817.081	97,72%
			Pengadaan Barang Milik Daerah		Pengadaan Mebel	4.890.491	4.171.603	85,30%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.569.859			54.545.000	94,74%		
	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	83.770.510	57.580.870	68,73%		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya	46.220.453	40.531.414	87,69%		

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	
4.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik		Daerah	Air dan listrik				
				Jasa Pelayanan Umum Kantor	23 2.899.732	231.105.008	99,22%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000	36.971.800	99,92%
					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak atau Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	47.500.000	47.088.475	99,13%
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 1.600.000	10.450.000	90,08%	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086	3.125.000	93,98%	
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 5.638.000	23.715.000	92,49%
			Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik	99.172.460	80.969.000	81,64%

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%
				Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Instrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	648.676.375	633.980.750	97,73%
				Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Wilayah Kecamatan	40.600.000	30.635.000	75,45%
		Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Daerah	12.880.000	12.600.000	97,82%
				Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	5.075.000	4.725.000	93,10%

Sumber : CALK 2024 Kec. Kintap

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. AKUNTABILITAS KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah melalui alat pertanggungjawaban secara periodik (Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999).

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerja, Pemerintah Kabupaten Tanah laut menetapkan kategorisasi pencapaian kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi 5 (lima) kategori sebagai berikut :

Tabel 52. Pengelompokan Capaian Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
I	91% kurang dari sama dengan 100%	Sangat Tinggi
II.	76% kurang dari sama dengan 90%	Tinggi
III.	66% kurang dari sama dengan 75%	Sedang
IV.	51% kurang dari sama dengan 65%	Rendah
V.	Kurang dari sama dengan 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 86 tahun 2017

Adapun capaian kinerja Sasaran strategis Kantor Kecamatan Kintap terhadap target sebagai berikut :

Tabel 6. Realisasi Target dan Capaian Sasaran Strategis dan Indikator Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan di Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di Kecamatan;	0,21	0,35	166,66
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88,79	98,65
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	70	63,65	90,5

Sumber : E-Sakip 2024

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Berikut ini Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :

Tabel 7. Rekap Nilai SAKIP Provinsi KALSEL Tahun 2023-2024

NO	PROVINSI	NILAI SAKIP 2023	NILAI SAKIP 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Provinsi Kalimantan Selatan	81,21	82,04	0,83

Sumber : Biro organisasi Setda Prov.kalsel

Tabel 15. Rekapitulasi Nilai SAKIP Kabupaten/Kota Provinsi Kalsel Tahun 2023-2024

NO	KOTA/KABUPATEN	NILAI SAKIP 2023	NILAI SAKIP 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN
1	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	82,08	84,07	1,99
2	Kabupaten Balangan	70,17	72,09	1,92
3	Kabupaten Tapin	69,02	71,00	1,98
4	Kota Banjarmasin	72,73	70,70	2,03
5	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	68,33	70,20	1,87
6	Kabupaten Tanah Laut	67,52	70,16	2,64
7	Kabupaten Barito Kuala	68,53	68,01	0,52

8	Kabupaten Tabalong	67,48	67,10	0,38
9	Kabupaten Tanah Bumbu	66,04	67,09	1,05
10	Kabupaten Banjar	68,10	68,10	0,00
11	Kota Banjarbaru	67,02	66,83	0,19
12	Kabupaten Hulu Sungai Utara	64,40	64,82	0,42
13	Kabupaten Kotabaru		61,78	61,78

Sumber : Biro organisasi Setda Prov.kalsel

Berikut ini akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap Tahun 2024, Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama, Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2024, Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian kinerja Tahun 2022, 2023 dan 2024, Perbandingan realisasi kinerja dengan target RPD 2024-2026, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kecamatan lain, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Standar Nasional, Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini :

## 1. Pencapaian kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah (IKU)

### a. Eselon IIIa (Camat)

#### Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Camat 2024

Target dan realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap Tahun 2024 seperti tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 17. Realisasi Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan kintap Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target /PK Camat	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	Nilai	0,35	166,66
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90,00	Nilai	88,79	98,65
2	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	70,00	Nilai	63,65	90,92
Rata-Rata Capaian						118,74

Sumber : Laporan Kinerja TR IV

Berikut ini penjelasan capaian indikator utama adalah sebagai berikut :

**1. Rasio Desa Mandiri  
(RDM) Rumus  
Perhitungan :**

$$\text{Rasio Desa Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Desa Mandiri}}{\text{Jumlah desa yang ada}}$$

Berikut adalah cara menghitung Rasio Desa Mandiri (RDM) berdasarkan data dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Republik Indonesia:

**Komponen RDM**

1. Indeks Kemandirian Ekonomi (IKE)
  - Jumlah Penduduk Miskin (JPM)
  - Pendapatan Per Kapita (PPK)
  - Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
- b. Indeks Kemandirian Pangan (IKP)
  - Jumlah Produksi Pangan (JPP)
  - Konsumsi Pangan per Kapita (KPK)
  - Ketersediaan Pangan (KP)
- c. Indeks Kemandirian Energi (IKE)
  - Jumlah Sumber Energi Terbarukan (JSET)
  - Konsumsi Energi per Kapita (KEPK)
  - Ketersediaan Energi (KE)
- d. Indeks Kualitas Hidup (IKH)
  - Tingkat Kematian Bayi (TKB)
  - Tingkat Kematian Ibu Melahirkan (TKIM)
  - Jumlah Fasilitas Kesehatan (JFK)
- e. Indeks Tata Kelola Pemerintahan Desa (ITKPD)
  - Kualitas Perencanaan (KP)
  - Kualitas Pelaksanaan (KPL)

## - Kualitas Pengawasan (KPG)

### Rumus Perhitungan RDM

$$\text{RDM} = (\text{IKE} + \text{IKP} + \text{IKE} + \text{IKH} + \text{ITKPD}) / 5$$

### Kategori RDM

1. Desa Sangat Tertinggal: RDM < 0,3
2. Desa Tertinggal: RDM 0,3-0,5
3. Desa Berkembang: RDM 0,5-0,7
4. Desa Maju: RDM 0,7-0,9
5. Desa Mandiri: RDM ≥ 0,9

Rasio desa mandiri di Kecamatan Kintap Tahun 2024 adalah 0,35 dengan rincian terdapat 5 desa yang sudah mandiri yaitu desa Kintapura, Bukit Mulia dan Kebun Raya, Sungai Cuka, dan Desa Sumber Jaya dari 14 desa yang ada di Kecamatan. 5 desa tersebut sudah dapat mencapai RDM ≥ 0,9 maka masuk dalam katagori desa mandiri. Data tersebut diambil dari aplikasi Kemendes PDTT Republik Indonesia Tahun 2024. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

	A	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	KODE_PR	KODE_ID	NAMA_KECAMATAN	KODE_DE	NAMA_DESA	IKS_2t	IKE_2t	IKL_2t	NILAI_IDM_2024	STATUS_IDM_2024	Keterangan
53995	63	630106	PANYIPATAN	6301062007	TANJUNG DEWA	0.7771	0.7000	1.0000	0.8257	MANDIRI	
53996	63	630106	PANYIPATAN	6301062008	SUKA RAMAH	0.8629	0.8000	0.6667	0.7765	MAJU	
53997	63	630106	PANYIPATAN	6301062009	BATU MULYA	0.8914	0.8333	1.0000	0.9083	MANDIRI	
53998	63	630106	PANYIPATAN	6301062010	BUMI ASIH	0.7771	0.6000	0.8667	0.7479	MAJU	
53999	63	630107	KINTAP	6301072001	PANDAN SARI	0.7600	0.7000	0.8000	0.7533	MAJU	
54000	63	630107	KINTAP	6301072002	KINTAP	0.7371	0.5500	0.8000	0.6957	BERKEMBANG	
54001	63	630107	KINTAP	6301072003	KINTAPURA	0.9143	0.8667	0.6667	0.8159	MANDIRI	
54002	63	630107	KINTAP	6301072004	SUNGGAI CUKA	0.9029	0.8833	0.9333	0.9065	MANDIRI	
54003	63	630107	KINTAP	6301072005	RIAM ADUNGAN	0.7143	0.5667	0.8000	0.6937	BERKEMBANG	
54004	63	630107	KINTAP	6301072006	MUARA KINTAP	0.8400	0.7000	0.7333	0.7578	MAJU	
54005	63	630107	KINTAP	6301072007	SALAMAN	0.8057	0.6500	0.6000	0.6852	BERKEMBANG	
54006	63	630107	KINTAP	6301072008	KINTAP KECIL	0.8971	0.9667	0.5333	0.7990	MAJU	
54007	63	630107	KINTAP	6301072009	PASIR PUTIH	0.9600	0.8000	0.6667	0.8089	MAJU	
54008	63	630107	KINTAP	6301072010	SUMBER JAYA	0.8857	0.8833	0.8667	0.8786	MANDIRI	
54009	63	630107	KINTAP	6301072011	BUKIT MULIA	0.8914	0.8833	1.0000	0.9249	MANDIRI	
54010	63	630107	KINTAP	6301072012	KEBUN RAYA	0.8457	0.7167	0.9333	0.8319	MANDIRI	
54011	63	630107	KINTAP	6301072013	MEKAR SARI	0.8514	0.7500	0.5333	0.7116	MAJU	
54012	63	630107	KINTAP	6301072014	SEBAMBAN BARU	0.8457	0.7500	0.7333	0.7763	MAJU	
54013	63	630108	TAMBANG ULANG	6301082001	TAMBANG ULANG	0.8114	0.6000	0.7333	0.7149	MAJU	
54014	63	630108	TAMBANG ULANG	6301082002	SUNGGAI PINANG	0.9086	0.6500	0.6000	0.7195	MAJU	

Gambar 2. Indeks Desa Membangun 2024

## 2. Indeks Kepuasan Masyarakat

. Berdasarkan pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) per responden dan per unsur pelayanan berupa 150 lembar kuisioner yang dibagikan, terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang memuat unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu :

1. Persyaratan;
2. Sistem, Mekanisme dan Prosuder Pelayanan;
3. Waktu Penyelesaian;
4. Kewajaran Biaya / Tarif Pelayanan ;
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan;
6. Kompetensi / Kemampuan Pelaksanaan Pelayanan;
7. Perilaku Pelaksana Pelayanan;
8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan ; dan
9. Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Dari Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di dapat nilai untuk IKM Tahun 2024 adalah dari target 90%, dengan nilai capaian sebesar 88,79%.

Nilai capaian IKM tahun 2024 bila dibandingkan dengan capaian IKM Tahun 2023 memang mengalami peningkatan sebesar 0,15 %. Pada tahun 2023 nilai IKM yang diperoleh Kecamatan Kintap yaitu 88,64%

Sebagaimana diketahui bahwa kategorisasi mutu pelayanan sebuah instansi pemerintah berdasarkan Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan dapat kita lihat pada urai tabel berikut:

Tabel 18 .Tabel Mutu pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3	3,0644– 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

*PerMenPAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017*

Indeks Kepuasan Masyarakat Kantor Kecamatan Kintap diambil dari hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan di Kecamatan Kintap Tahun 2024, survei dilakukan pada triwulan 1, Triwulan 2, Triwulan 3 dan Triwulan 4 masing-masing dilakukan terhadap 150 responden yang mendapatkan pelayanan di kantor Kecamatan Kintap dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.9 Hasil Survey IKM Kecamatan Kintap Tahun 2024

No.	Ruang Lingkup SKM	NRR TW 1	NRR TW II	NRR TW III	NRR TW IV
1	Persyaratan	3,370	3,492	3,584	3,620
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	3,370	3,431	3,568	3,660
3	Waktu Penyelesaian	3,330	3,415	3,416	3,640
4	Biaya / Tarif	3,990	4,000	4,000	4,000
5	Kesesuaian Produk Pelayanan	3,460	3,462	3,488	3,580
6	Kompetensi Petugas Pelayanan	3,530	3,544	3,504	3,600
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3,510	3,354	3,472	3,600
8	Penanganan Pengaduan	3,380	3,492	3,488	3,580
9	Kesopanan dan Keramahan Petugas	3,840	3,815	3,840	3,760
NRR 9 Ruang Lingkup Pelayanan		3,491	3,522	3,560	3,634
Nilai Hasil IKM		82,29	88,04	88,99	90,86

Sumber : Kasi Pelayanan 2024

Dari Tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai Rata-rata (NRR) tertinggi adalah unsur Biaya/tarif (4,000) sedangkan unsur yang Nilai Rata-rata (NRR) terendah adalah unsur waktu penyelesaian (3,330). Angka ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan pelayanan paling tinggi diperoleh dari kejelasan biaya/tarif sesuai ketentuan, sedangkan untuk Nilai Rata-rata semua unsur sebesar 3,522 hal ini menggambarkan bahwa penilaian masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan Kecamatan Kintap pada umumnya baik (mutu pelayanan) dan sudah merasa puas, akan tetapi unsur-unsur dengan NRR paling rendah perlu dilakukan perbaikan dalam hal ini unsur waktu penyelesaian.

Berdasarkan hasil survei pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh hasil skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) TR I : 82,29, TR II : 88,04, TR III : 88,89 dan TR IV : 90,86 maka Nilai akhir IKM Kecamatan Kintap Adalah 88,79, sehingga kinerja pelayanan Kecamatan Kintap berada pada mutu pelayanan dengan kategori Sangat Baik, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 88,31 – 100,00.

Pada Tahun 2024 Kecamatan Kintap menetapkan target nilai IKM sebesar 90% sementara berdasarkan hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2024 diperoleh

realisasi nilai IKM 88,79 (Mutu Pelayanan Baik) terhadap 9 (Sembilan) unsur pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai IKM Kecamatan Kintap hampir mencapai dari target yang ditetapkan

Kendala permasalahan yang dihadapi Kecamatan Kintap dalam mencapai target IKM adalah ada unsur pelayanan yang masih memperoleh NRR rendah sebagai berikut :

1. Unsur waktu penyelesaian pelayanan yang mendapatkan NRR terendah dikarenakan waktu pelayanan yang melibatkan operator Capil yang hanya bertugas dari hari senin sampai dengan rabu sehingga waktu penyelesaian terhambat.
2. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan prima bagi masyarakat.
3. Tidak ada anggaran dan kekosongan jabatan Kasi Pelayanan yang untuk sementara dipimpin oleh seorang Plt. Kasi Pelayanan

Adapun upaya/solusi tindakan yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi sebagai berikut :

1. Melakukan perbaikan sistem dan prosedur (SOP) dalam hal pengaduan, saran dan masukan dengan membuat banner/spanduk yang berisi tata cara alur dan mekanisme pengurusan perizinan/surat keterangan di Kecamatan Kintap.
2. Berkoordinasi dengan SKPD terkait (Diskominfo) untuk pembuatan sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Kintap.
3. Membuka kanal pengaduan, saran, dan masukan melalui media sosial yang sedang populer dikalangan masyarakat usia produktif.

Rencana aksi yang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Menyiapkan kotak pengaduan, saran dan masukan dari masyarakat untuk bahan evaluasi dan monitoring bagi perbaikan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mempersiapkan anggaran untuk pelaksanaan membangun sistem aplikasi pelayanan dan perizinan di Kecamatan Kintap.
3. Mengaktifkan lagi akun Sosial Media Kecamatan Kintap dalam rangka keterbukaan informasi kepada masyarakat maupun sebagai laporan kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kintap sehingga kinerja Kecamatan Kintap dapat diketahui oleh masyarakat.

Selain itu diharapkan kerjasama dengan para stake holder terkait untuk memberikan kritik dan saran yang sifatnya membangun agar pelayanan di Kecamatan Kintap sesuai dengan harapan masyarakat.

### 3. Nilai AKIP Kecamatan Kintap

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan, pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtiran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Ruang lingkup evaluasi AKIP mencakup antara lain : 1. Penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan; 2. Penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; 3. Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaan yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; 4. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja ; dan 5. Penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan Gambaran Tingkat AKIP dengan katagori predikat sebagai berikut :

Tabel 20. Kategori predikat nilai AKIP

<b>Perdikat</b>	<b>Nilai</b>	<b>Interpretasi</b>
AA	90-100	Sangat memuaskan
A	80-90	Memuaskan
BB	70-80	Sangat Baik
B	60-70	Baik
CC	50-60	Cukup (Memadai)
C	30-50	Kurang

D	0-30	Sangat Kurang
---	------	---------------

Permen PANRB No. 88 Tahun 2021

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap menunjukkan nilai sebesar 63,65 dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Baik**” yaitu akuntabilitas yang baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, namun masih banyak perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 21. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kintap

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Nilai atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
		2023	2024
a. Perencanaan Kinerja	30	21	21,10
b. Pengukuran Kinerja	30	13,8	15,90
c. Pelaporan Kinerja	15	7,8	8,40
d. Evaluasi Internal	25	13	19,25
Nilai Hasil Evaluasi		55,6	63,65
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		<b>CC</b>	<b>B</b>

Sumber :LHE SAKIP Kecamatan Kintap tahun 2024

### **Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022, 2023, 2024**

Kecamatan Kintap telah berupaya maksimal dari tahun ke tahun dalam menerapkan SAKIP. Kecamatan Kintap Tahun 2024 telah mendapatkan nilai AKIP 63,65 dengan predikat Baik. Terjadi peningkatan pencapaian AKIP Kecamatan Kintap jika dibandingkan nilai AKIP Tahun 2023 yaitu 55,6, Ringkasan evaluasi AKIP sampai Tahun 2024 Kecamatan Kintap, provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Capaian Sakip Kintap Tahun 2021-2024

NO.	INDIKATOR KINERJA SASARAN PERANGKAT DAERAH	SATUAN	REALISASI CAPAIAN			REALISASI CAPAIAN TAHUN 2024		
			2022	2023	2024	TARGET	CAPAIAN	%
1	2	3	6	7	8	7	8	9
1	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap							
	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	Nilai	72,2	55,6	63,65	70	63,65	90,92

Sumber : Sekretariat Kecamatan Kintap

Realisasi target dan realisasi Sasaran Strategis dari Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap Tahun 2024. Lebih Jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 238. Realisasi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kintap Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap Jumlah Desa yang Ada di Kecamatan	0,21	0,35	166,66%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88,79	98,65%
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	70	63,65	90,92
Rata-Rata Capaian					118,74

### 1) Perbandingan Realisasi dengan Target:

Pencapaian realisasi dari target Tahun 2024 sebesar 88,79% untuk IKM dan Rasio Desa Mandiri sebesar 0,35 untuk rasio desa mandiri tidak bisa dibandingkan dengan tahun sebelumnya karena pada tahun 2023 belum terdapat indikator kinerja utama rasio desa mandiri. Sedangkan Indeks Kepuasan Masyarakat terjadi kenaikan realisasi nilai IKM dari 2023 ke 2024, sedangkan persentase capaian menurun dari tahun sebelumnya.

### 2) Perbandingan Realisasi dengan Realisasi terkait

a) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 terjadi sedikit peningkatan yaitu 88,64 % menjadi 88,79 %. Sedangkan rasio desa mandiri baru dilakukan penilaian di tahun 2024 sehingga tidak bisa dilakukan perbandingan dengan tahun sebelumnya, untuk tahun 2024 Rasio desa mandiri terhadap jumlah desa di kecamatan sebesar 0,35.

- b) Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 sebesar 84% untuk rasio desa mandiri dan 98,65% untuk IKM, dibandingkan tahun 2023 sebesar 99,60 % terjadi penurunan 0,95%. Penurunan persentase capaian terjadi karena target capaian tahun 2024 lebih tinggi dari tahun sebelumnya
- c) Realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Kecamatan Kintap tahun 2024 sebesar 90 untuk IKM, maka realisasi 2024 belum mencapai dari target;

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa Realisasi Sasaran Srategis Kecamatan Kintap dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024 terdapat peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Tujuan RPD Kecamatan Kintap 2024-2026 dalam wujud Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dengan Indikator tingkat kepuasan masyarakat (IKM) terhadap pelayanan umum yang ada di Kecamatan Tahun 2024 telah dilaksanakan dengan nilai 88,79.

Untuk lebih jelasnya realisasi dan target IKM Tahun 2019-2024 Kantor Kecamatan Kintap dapat di lihat dari grafik tersebut dibawah ini :



Grafik 1. Realisasi dan Target IKM Tahun 2019-2024

### 3) Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan Kecamatan lain

Capaian kinerja Kecamatan Kintap Tahun 2024 jika dibandingkan dengan Kecamatan lain yang ada di Kabupaten Tanah Laut dapat dilihat

pada tabel berikut ini :

Tabel 24. Capaian Kinerja Kecamatan Kintap dengan Kecamatan Lain di Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Satuan	KECAMATAN KINTAP			KECAMATAN BATI-BATI			KECAMATAN BUMI MAKMUR		
				Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian	Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian	Target /PK Camat	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan serta Pelayanan Publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	0,21	0,35	166,66	0,07	0,64	900,00	0,45	0,36	80,00
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90,00	88,79	98,65	90,00	92,48	102,76	90,00	92,13	102,37
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai AKIP Kecamatan Kintap	Nilai	70,00	63,65	90,92	75,00	75,60	100,80	75,00	72,10	96,13
Rata-Rata Capaian						118,74	367,85			92,83		

Sumber : Sekretariat Kecamatan Tahun 2024

Dibandingkan dengan Kecamatan Bati-Bati dan Bumi makmur maka capaian kinerja kecamatan kintap belum sepenuhnya memenuhi target indikator kinerja.

#### 4) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja

Dalam mencapai sasaran meningkatnya Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan umum yang ada di kecamatan, Kantor Kecamatan Kintap di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu Rp. 4.123.438.360,- (Empat Milyar Seratu Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 3.538.187.729,- (Tiga Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Delapan Puluh Tujuh Tujuh Ratus Dua Puluh Sembilan Rupiah) atau 85,81 %. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 25. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.291.396.525,-	Rp. 2.751.562.979,-	83,59
2.	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 25.638.000,-	Rp 23.715.000,-	92,49
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 788.448.835,-	Rp 745.584.750,-	94,56
4.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 17.955.000,-	Rp. 17.325.000,-	96,49
<b>JUMLAH</b>		<b>Rp. 4.123.438.360,-</b>	<b>Rp. 3.538.187.729,-</b>	<b>85,81</b>

Dalam mencapai capaian kinerja Kecamatan Kintap dengan realisasi capaian 85,81%, Kecamatan Kintap memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 96. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
118,74%	85,81%	32,93%

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

Nilai Sakip dengan target 70 dengan realisasi 63,65 (B) dengan presentase 90,92 % untuk mencapai target menggunakan anggaran Rp. 6.473.092,- (Enam Juta Empat Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah) kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah dan kendala yang dihadapi yaitu kurang berperannya para Kasi dalam mendokumentasikan setiap kegiatan.

- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :
  - a. Para kasi dan kasubbag lingkup Kecamatan Kintap diarahkan untuk melaksanakan kegiatan dengan membuat laporan kegiatan, melengkapi foto dan video kegiatan serta menyimpan dalam 1 (satu) folder tersendiri di PC atau laptop.
  - b. Mengintensifkan kegiatan rapat staf dalam rangka pemberian arahan kegiatan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakip yaitu :
  - a. Mengefektifkan penggunaan media sosial resmi kecamatan dalam rangka transparansi publik, menambah platform media sosial berupa instagram, mengupdate kembali konten berita kegiatan pada website kecamatan.
  - b. Melakukan desk untuk kasi dan kasubbag setiap triwulan agar lebih efisien dalam pengukuran kinerja masing masing.

## 2. Eselon III (Sekretaris)

Target dan realisasi sasaran strategis dan indikator kinerja Sekretaris Camat Kecamatan Kintap tahun 2024 tercantum dalam tabel dibawah ini

Tabel 107. Sasaran Strategis, Indikator, Target, Realisasi dan Capaian Sekretariat Kecamatan Kintap

No	Sasaran Strategis	Kinerja Utama	Target/PK Sekcam	Satuan	Realisasi	Persentase Capaian
1.	Meningkatnya kinerja akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap	Nilai komponen perencanaan	24	Nilai	21,10	87,91
		Nilai komponen pengukuran	24	Nilai	15,90	66,25
		Nilai komponen pelaporan	12	Nilai	8,40	70
		Nilai komponen evaluasi internal	20	Nilai	19,25	96,25
		Hasil survei pelayanan kesekretariatan penunjang kinerja perangkat daerah	90	Nilai	88,79	98,65
Rata-Rata Capaian						83,81

Sumber : Laporan Kinerja TW IV

Rumus Perhitungan :

Perhitungan mengacu pada **Permen PANRB No. 88 Tahun 2021** yaitu Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap, menunjukkan nilai sebesar 63,65 dengan predikat “**B**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas yang baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, masih perlu banyak perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 28. Hasil Evaluasi AKIP Kecamatan Kintap

NO	Komponen Yang Dinilai	Nilai	
		Capaian	Standar
1.	Perencanaan Kinerja	21,10	30,00
2.	Pengukuran Kinerja	15,90	30,00
3.	Pelaporan Kinerja	8,40	15,00
4.	Evaluasi Internal	19,25	25,00
5.	Capaian Sasaran	63,65	100,00

Berdasarkan tabel tersebut diatas, diperoleh penjelasan sebagai berikut:

### 1) Perbandingan realisasi dengan target;

Untuk Perencanaan Kinerja Kecamatan Kintap memperoleh nilai 21,10 atau 87,91% dari target yang telah ditetapkan, kemudian pada pengukuran kinerja memperoleh nilai 15,90 atau 66,25%. Untuk komponen pelaporan kinerja kecamatan kintap memperoleh nilai 8,40 atau 70%, sedangkan evaluasi internal kecamatan Kintap mendapatkan

nilai 19,25 atau 96,25% dari target yang telah ditetapkan. Nilai SAKIP Kecamatan Kintap Tahun 2024 untuk tahun 2023 adalah 63,65 atau dengan persentase capaian 90,92% dari target 70. Nilai tersebut termasuk dalam katagori capaian “**Baik**”.

## 2) **Perbandingan realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2023 dan tahun 2024**

Jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 55,6 sedangkan tahun 2024 sebesar 63,65, maka untuk tahun 2024 mengalami sedikit kenaikan atau sekitar 7,21 poin.

## 3) **Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Realisasi dan capaian kinerja di sekretariat setiap tahunnya meningkat dapat dilihat dari realisasi program kegiatan penunjang dan nilai SAKIP kecamatan Kintap. Hal ini ditunjang Sumberdaya Manusia yang ada dan sarana penunjang yang cukup lengkap dan terfasilitasi dengan baik sehingga realisasi capaian kinerja meningkat

## 4) **Analisa Penggunaan Sumber Daya**

Dalam menjalankan kegiatan pada bagian Sekretariat Kecamatan Kintap

dibantu oleh 9 (sembilan) orang ASN dan 3 (orang) PTT, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Sumber Daya Manusia pada Bagian Sekretariat

NO	JABATAN	ASN	PTT
1	Sekretaris	1	
2	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	1	
3	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1	
4	Bendahara	1	
5	Verifikator	1	
6	Analisis Tata Laksana		
7	Pengadministrasi Umum		
8	Pengelola Sarana dan Prasarana	1	
9	Petugas Operator Keuangan		1
10	Petugas Pengadministrasi Umum dan Kepegawaian		2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>3</b>

## 5) **Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Dalam mencapai sasaran yang ingin dicapai, Kantor Kecamatan Kintap di dukung oleh Program/kegiatan penunjang dengan pagu 3.291.396.525-. (tiga milyar dua ratus sembilan puluh satu tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 2.751.562.979- (dua milyar tujuh ratus lima puluh satu juta lima ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah) atau sebesar 83,59%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 30. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3.291.396.525,-	Rp. 2.751.562.979,-	83,59%

Dalam mencapai capaian kinerja pada bagian sekretariat Kecamatan Kintap dengan realisasi capaian kinerja 83,59%, Kecamatan Kintap memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 31. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Bagian Sekretariat Kecamatan Kintap Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
83,81%	83,59%	(0,22%)

- Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:
  - a. Kurangnya tenaga ASN yang menangani kearsipan dokumen dengan kualifikasi golongan II jabatan fungsional arsiparis.
  - b. Kurangnya kendaraan dinas operasional yang menunjang kegiatan dalam pembinaan, pemberdayaan desa untuk sosialisasi dan edukasi sesuai tupoksi seksi masing-masing.
  - c. Jarak tempuh yang jauh untuk mengikuti pelatihan bagi staf untuk penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD (Bulanan, Triwulanan, Semester, Tahunan), serta Laporan Kinerja SKPD.
- Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu :

- a. Melakukan usulan kebutuhan ASN yang menangani masalah kearsipan lingkup kecamatan Kintap sehingga tata kelola kearsipan menjadi efektif dan tepat sasaran.
  - b. Melakukan usulan pelatihan dan bimbingan teknis bagi staf ASN Kecamatan Kintap dalam rangka penyusunan Laporan Perencanaan SKPD, Laporan Keuangan SKPD, Laporan Kinerja SKPD sehingga tahapan penyusunan perencanaan daerah, penyusunan anggaran daerah dan penatusahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan SKPD sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan.
  - c. Melakukan usulan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) untuk kendaraan operasional Tahun 2024 Kecamatan Kintap.
- Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai sakiip yaitu :
- Pendekatan dan pengawalan terhadap usulan yang diajukan melalui SKPD yang membidangi kepegawaian, perencanaan anggaran dengan Tim anggaran Pemerintah Daerah serta Badan Anggaran DPRD.

### **3. Eselon IV (Kepala Sub Bagian/Seksi)**

Kecamatan Kintap sudah melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN), dengan di dukung oleh Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh sub bagian/seksi-seksi yang ada pada lingkup Kecamatan Kintap. Ada 4 (empat) Program dan 10 (sepuluh) kegiatan yang mendukung pelaksanaan pencapaian sasaran strategis pertama Kecamatan Kintap. Adapun Target, realisasi dan capaian Kinerja kepala subbagian dan Kepala Seksi lingkup kecamatan Kintap sebagai berikut:

#### **1) Kepala Seksi Tata Pemerintahan**

Tabel 32. Realisasi Target Sasaran, indikator Program dan Kegiatan Seksi Tata Pemerintahan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Persentase capaian	Persentase Keuangan
1. Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang administrasi	100%	100%	100%	81,64
2. Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 orang	17 orang	100%	
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>					<b>100%</b>

Sumber : Laporan Kinerja TW IV

Berikut ini tabel efisiensi pada seksi Tata Pemerintahan :

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	81,64%	(18,36%)

Rumus Perhitungan :

1. Persentase desa yang tertib administrasi

$$\text{Persentase desa yang tertib administrasi} = \frac{\text{Jumlah desa yang tertib administrasi}}{\text{Jumlah desa yang ada}} \times 100$$

Desa Tertib Administrasi adalah suatu kondisi di mana desa memiliki sistem administrasi yang rapi, terorganisir, dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan, dan kemasyarakatan.

Karakteristik Desa Tertib Administrasi :

- Sistem Administrasi yang Rapi : Desa memiliki sistem administrasi yang terstruktur dan terorganisir.

- Pengelolaan Keuangan yang Baik : Desa memiliki pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan efektif.
- Dokumentasi yang Lengkap : Desa memiliki dokumentasi yang lengkap dan rapi tentang urusan pemerintahan, keuangan, dan kemasyarakatan.
- Keterbukaan dan Akuntabilitas : Desa memiliki keterbukaan dan akuntabilitas dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.

#### Manfaat Desa Tertib Administrasi

- Meningkatnya efisiensi : Desa dapat mengelola urusan pemerintahan dan keuangan lebih efisien
- Meningkatnya transparansi : Desa dapat meningkatkan transparansi dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.
- Meningkatkan Akuntabilitas : Desa dapat meningkatkan akuntabilitas dalam mengelola urusan pemerintahan dan keuangan.
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan : Desa dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dari total 14 desa yang ada semua desa telah melakukan tertib administrasi, terorganisir dan efektif dalam mengelola urusan pemerintahan, keuangan dan kemasyarakatan

#### a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Tata Pemerintahan

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang Plt Kasi Tapem (Pejabat Pengawas). Kegiatan yang dilaksanakan pada Kasi Tapem yaitu mewujudkan desa yang tertib administrasi, terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam kegiatan ini diwujudkan melalui penyelenggaraan hari ulang tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79.

#### c. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi Tata Pemerintahan

Pada tahun 2024, seksi tata pemerintahan mendapat anggaran untuk kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar Rp. 99.172.460 dan terserap sebesar Rp 80.969.000 atau 81,64%.

**d. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Tata Pemerintahan**

Permasalahan yang dialami dalam pencapaian indikator kinerja bersangkutan pada seksi tata pemerintahan adalah Kesulitan mendapatkan data kependudukan yang valid dan tepat waktu disebabkan kurangnya pemahaman Kepala Dusun dan RT bahwa Laporan Kependudukan harus segera di Laporkan setiap bulan ke Kasi Pemerintahan Desa untuk di Rekap dan diteruskan Ke Kecamatan hanya karena mengalami keterlambatan dalam menerima honor karena pada awal tahun Anggaran APBDes belum turun/disahkan, Kurangnya perhatian dari Kasi Tata Pemerintahan Desa untuk Update Laporan Data Kependudukan setiap bulan sehingga menyebabkan Laporan Validasi Jumlah Realisasi Data Kependudukan mengalami keterlambatan, dan untuk kegiatan HUT RI masih ada petugas paskibra yang kelelahan dan pingsan sehingga mengganggu latihan yang lain. Belum adanya staf pada Seksi Tata Pemerintahan sehingga kurang terorganisirnya kinerja yang ada di seksi Tata Pemerintahan.

**e. Rencana Tindak Lanjut**

Dalam hal Kurangnya perhatian dari Kasi Tata Pemerintahan Desa untuk Update Laporan Data Kependudukan setiap bulan sehingga menyebabkan Laporan Validasi Jumlah Realisasi Data Kependudukan mengalami keterlambatan tindak lanjut yang akan datang Kasi Tata Pemerintahan Kecamatan agar lebih giat lagi dalam mengingatkan Kasi Tata Pemerintahan Desa agar Laporan sesuai dengan Target dan Sasaran. Dalam hal Kesulitan mendapatkan data kependudukan yang valid dan tepat waktu disebabkan kurangnya pemahaman Kepala Dusun dan RT bahwa Laporan Kependudukan harus segera di Laporkan setiap bulan ke Kasi Pemerintahan Desa untuk di Rekap dan diteruskan Ke Kecamatan hanya

karena mengalami keterlambatan dalam menerima honor karena pada awal tahun Anggaran APBDes belum turun/disahkan tindak lanjut yang akan datang Perlunya keterbukaan dan penjelasan ke RT dan Dusun Desa setempat untuk tetap melaporkan Data Kependudukan setiap bulan bahwa honor tetap dibayarkan oleh Desa akan tetapi tidak diawal bulan dan menunggu proses APBDes selesai pada Triwulan I. Serta mengajukan penambahan staf untuk membantu pada seksi Tata Pemerintahan. Berikut dilampirkan foto foto kegiatan di kasi tata pemerintahan



Gambar 3. Pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka HUT RI Ke 79 di halaman kantor Kecamatan Kintap

## 2) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

Tabel 33. Realisasi Target , Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase keuangan
1. Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDes yang operasional berjalan baik	100	100	100	96,49
2. Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	100	100	
3. Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	100	100	
4. Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan	24 dokumen	24 Dokumen	100	

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase keuangan
pendayagunaan aset desa	desa dan pendayagunaan aset desa				
<b>Rata-rata capaian kinerja Tahun 2024</b>					<b>100</b>

Sumber : Laporan Kinerja TW IV

### Rumus perhitungan

#### 1. Persentase Bumdes yang dibina

$$\text{Persentase Bumdes yang dibina} = \frac{\text{Jumlah Bumdes yang dibina}}{\text{Jumlah Bumdes yang ada}} \times 100$$

Untuk meningkatkan layanan terhadap perekonomian masyarakat maka seksi PMD memfasilitasi pengelolaan BUMDes yang ada di Kecamatan Kintap, dari 14 desa yang ada di kecamatan ada 12 BUMDes yang aktif mengembangkan usahanya. pemasaran hasil produksi dilaksanakan pada Pameran Pembangunan pada hari Jadi Kabupaten Tanah Laut ke-59 serta dengan mengangkat BUMDes yang ada di Kecamatan yang bergerak dalam usaha pembuatan telur asin, peternakan lebah madu, krupuk, pentol ikan, kain dan baju sasirangan tetap berjalan sampai dengan sekarang.

Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yaitu pemberdayaan BUMDes dan juga UMKM.

Pembinaan dan fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2024, yaitu kegiatan Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dan pembinaan administrasi pengelolaan keuangan desa. Untuk pelaksanaan kegiatan ini sudah dilaksanakan Evaluasi APBDesa untuk 14 (empat belas) desa yang ada di Kecamatan Kintap dengan Persentase capaian kegiatan sebesar 100 % .



Gambar 4. Evaluasi APBDes di Kecamatan Kintap

**BERITA ACARA**

**PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA**

Pada hari Selasa Tanggal 16 Mei 2018 Jam 10.00 telah dilaksanakan kegiatan pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan desa bertempat kantor desa Sungai Cuka Oleh Tim Pembinaan administrasi Desa.

Yang terdiri : 1. Ahmad Yani, S.Pa.  
2. Hetti Susilo Maitubu, S.Sor  
3. Jatman

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Kepala Desa Sungai Cuka  
Priswandi

Tim Pembinaan  
1. [Signature]  
2. [Signature]

Catatan :  
- Untuk berita yang tidak ada, mohon dilengkapi dan arahan dari Pembinaan Desa untuk di tindak lanjuti.  
- DC Bni Kepala Desa sebagai produk output dari proses di desa keur keuangan/berbagai untuk penyelesaian yang

DAFTAR KELENGKAPAN DALAM RANGKA PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA

DESA Sungai Cuka  
Pony Tanggal: 16 Mei 2018 - 1 Juni 2018

NO	URAIAN	KELENGKAPAN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	1. SKD	✓		
2	2. SKP	✓		
3	3. SKB	✓		
4	4. SKD	✓		
5	5. SKP	✓		
6	6. SKB	✓		
7	7. SKD	✓		
8	8. SKP	✓		
9	9. SKB	✓		
10	10. SKD	✓		
11	11. SKP	✓		
12	12. SKB	✓		
13	13. SKD	✓		
14	14. SKP	✓		
15	15. SKB	✓		
16	16. SKD	✓		
17	17. SKP	✓		
18	18. SKB	✓		
19	19. SKD	✓		
20	20. SKP	✓		
21	21. SKB	✓		
22	22. SKD	✓		
23	23. SKP	✓		
24	24. SKB	✓		
25	25. SKD	✓		
26	26. SKP	✓		
27	27. SKB	✓		
28	28. SKD	✓		
29	29. SKP	✓		
30	30. SKB	✓		
31	31. SKD	✓		
32	32. SKP	✓		
33	33. SKB	✓		
34	34. SKD	✓		
35	35. SKP	✓		
36	36. SKB	✓		
37	37. SKD	✓		
38	38. SKP	✓		
39	39. SKB	✓		
40	40. SKD	✓		
41	41. SKP	✓		
42	42. SKB	✓		
43	43. SKD	✓		
44	44. SKP	✓		
45	45. SKB	✓		
46	46. SKD	✓		
47	47. SKP	✓		
48	48. SKB	✓		
49	49. SKD	✓		
50	50. SKP	✓		
51	51. SKB	✓		
52	52. SKD	✓		
53	53. SKP	✓		
54	54. SKB	✓		
55	55. SKD	✓		
56	56. SKP	✓		
57	57. SKB	✓		
58	58. SKD	✓		
59	59. SKP	✓		
60	60. SKB	✓		
61	61. SKD	✓		
62	62. SKP	✓		
63	63. SKB	✓		
64	64. SKD	✓		
65	65. SKP	✓		
66	66. SKB	✓		
67	67. SKD	✓		
68	68. SKP	✓		
69	69. SKB	✓		
70	70. SKD	✓		
71	71. SKP	✓		
72	72. SKB	✓		
73	73. SKD	✓		
74	74. SKP	✓		
75	75. SKB	✓		
76	76. SKD	✓		
77	77. SKP	✓		
78	78. SKB	✓		
79	79. SKD	✓		
80	80. SKP	✓		
81	81. SKB	✓		
82	82. SKD	✓		
83	83. SKP	✓		
84	84. SKB	✓		
85	85. SKD	✓		
86	86. SKP	✓		
87	87. SKB	✓		
88	88. SKD	✓		
89	89. SKP	✓		
90	90. SKB	✓		
91	91. SKD	✓		
92	92. SKP	✓		
93	93. SKB	✓		
94	94. SKD	✓		
95	95. SKP	✓		
96	96. SKB	✓		
97	97. SKD	✓		
98	98. SKP	✓		
99	99. SKB	✓		
100	100. SKD	✓		

Catatan:  
Untuk berita yang tidak ada, mohon dilengkapi dan arahan dari Pembina Desa untuk di tindak lanjuti.

Kepala Desa Sungai Cuka  
Priswandi

Tim Pembinaan  
1. [Signature]  
2. [Signature]

DAFTAR HADIR  
PEMBINAAN ADMINISTRASI DESA

DESA Sungai Cuka

TANGGAL	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Heriyanto	PLD	<u>[Signature]</u>
2	Jatman	Kepala Desa PAD	<u>[Signature]</u>
3	Hetti Susilo Maitubu	PLD Tingkat	<u>[Signature]</u>
4	Priswandi	KESEKAPES	<u>[Signature]</u>
5	Priswandi	Kepala Desa Jember	<u>[Signature]</u>
6	Priswandi	Kepala Desa	<u>[Signature]</u>
7	Priswandi	PLD	<u>[Signature]</u>
8	Priswandi	PLD	<u>[Signature]</u>
9	Priswandi	PLD	<u>[Signature]</u>
10			
11			
12			
13			
14			
15			

Kepala Desa Sungai Cuka  
Priswandi

Tim Pembinaan  
1. [Signature]  
2. [Signature]

Gambar 5. Berita Acara pembinaan administrasi dan pengelolaan desa

Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa, yaitu pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan oleh 14 desa yang ada di lingkungan kecamatan Kintap dan dilanjutkan dengan Pra Musrenbang Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan di kecamatan Jorong dan Musrenbang Tingkat Kecamatan dengan menghadirkan utusan desa, Pendamping Desa dan kecamatan serta instansi terkait.



Gambar 6. Pelaksanaan Musrenbang Desa di Kecamatan Jorong

Untuk pemanfaatan teknologi tepat guna pada kecamatan Kintap terdapat Posyantek namun sudah tidak beroperasi lagi karena kurangnya sumber daya manusia dalam pengembangan posyantek tersebut.

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi PMD**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kecamatan Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 2 (dua) orang yaitu 1 orang Kasi PMD (Pejabat Pengawas) dan 1 orang staf ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan untuk memfasilitasi kegiatan yang sesuai dengan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi PMD yaitu melakukan kegiatan Fasilitasi Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Desa Khusus (Musdesus), Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan), Pelaksanaan Evaluasi APBDDes, Evaluasi APBDDes perubahan, melakukan fasilitasi kelompok masyarakat dalam memasarkan produknya.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Seksi PMD**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi PMD di tunjang dengan 1 (satu) Program, 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 17.955.000,- (tujuh belas juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) terealisasi Rp. 17.325.000,- (Tujuh belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 96,49%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 114. Realisasi Program Penunjang pada Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
a.	Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 17.955.000,-	Rp. 17.325.000,-	96,49%
-	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. 12.880.000,-	Rp. 12.600.000,-	97,83%
-	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. 5.075.000,-	Rp. 4.725.000,-	93,10%
<b>Total</b>		<b>Rp. 17.955.000,-</b>	<b>Rp. 17.325.000,-</b>	<b>96,49%</b>

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi PMD Kecamatan Kintap dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Kintap memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 35. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi PMD Kecamatan Kintap Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	96,49%	3,51%

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD**

1. Terbatasnya usulan perencanaan pembangunan pada hasil Musrenbang Desa dan Musrenbang Kecamatan yang diusulkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten. Serta Musrenbang kecamatan yang dilaksanakan digabung dengan Kecamatan lain.
2. Kurangnya koordinasi dan konsultasi antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam sinkronisasi dan harmonisasi program, kegiatan untuk keselarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Kurangnya pengetahuan tentang peraturan-peraturan bagi aparatur desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan Dana Desa yaitu Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten, maupun Dana Desa dari Kementerian Desa dan PDT yang berasal dari Dana APBN.
4. Kurangnya pengetahuan sebagian anggota tim evaluasi sehingga evaluasi keuangan desa kurang maksimal.
5. Masih ada BUMDes di beberapa desa yang sudah tidak aktif lagi

**d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi PMD**

1. Melakukan skala prioritas untuk usulan perencanaan pembangunan serta pendekatan kepada anggota legislatif sesuai daerah pemilihan (dapil) untuk dimasukkan pada usulan pokok pikiran (pokir) DPRD.
2. Melakukan indentifikasi program dan kegiatan desa yang di susun oleh aparatur desa akan di selaraskan dengan Rencana Kerja SKPD, RPJMD dan visi misi Kepala Daerah dan Waki Kepala Daerah sehingga percepatan pelaksanaan program kegiatan pembangunan dapat direalisasikan bagi masyarakat desa.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan desa bagi aparatur desa dalam penataan administrasi dokumen pertanggungjawaban (SPJ) yang di dukung dengan aplikasi sistem manajemen keuangan desa sehingga tidak terjadi penyimpangan keuangan desa sesuai peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan desa.
4. Mengadakan pelatihan dan bimtek khusus tim evaluasi.
5. Melakukan pembinaan terhadap BUMDes yang tidak aktif lagi agar dapat mengembangkan usahanya kembali.

**e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan pada Seksi PMD yaitu :**

1. Meningkatkan perbaikan kualitas rancangan kerja awal usulan perencanaan pembangunan yang terdiri dari usulan aspirasi

masyarakat, pokok pikiran DPRD (Pokir DPRD) dimulai Musyawarah Desa (Musdes), Musrenbang Kecamatan.

2. Mengikutsertakan perwakilan masyarakat dari tiap RT/RW dalam setiap program kegiatan yang dilaksanakan dengan maksud agar masyarakat juga dapat turut memahami, mengerti, mengawal, dan mengawasi jalannya pelaksanaan pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan pelatihan dan bimbingan teknis bagi aparatur desa dan Badan Perwakilan Desa (BPD) untuk penyusunan standar satuan harga (SSH) dan Pelaporan Aset Desa sebagai lampiran penyusunan Laporan Keuangan Desa.

### 3) Kepala Seksi Kemasyarakatan

Tabel 36. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Kemasyarakatan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1. Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100%	97,73
2. Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan sosial	Jumlah koordinasi penyaluran bantuan sosial	2 Kali	2 Kali	100%	
<b>Rata-rata capaian kinerja tahun 2024</b>					<b>100%</b>

Sumber : Laporan Kinerja TW IV

Rumus Perhitungan :

#### 1. Persentase PPKS yang Terfasilitasi

$$\text{Persentase PPKS yang terfasilitasi} = \frac{\text{Jumlah PPKS yang difasilitasi}}{\text{Jumlah PPKS yang ada}} \times 100$$

Kegiatan pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat salah satunya yang dilaksanakan di kecamatan Kintap yaitu bantuan terhadap korban bencana alam berupa banjir yang terjadi di desa kintapura, kintap, kintap kecil, pasir putih, salaman dan riam adungan pada bulan juni, dan banjir air rob di desa Muara Kintap



Gambar 7. Penyaluran bantuan untuk korban banjir di desa Kintapura

Berikut dilampirkan juga berita acara bantuan yang berasal dari Dinsos

**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
**DINAS SOSIAL**  
 Jalan Letjen R. Soeparto No. 8 Banjarmasin Kode Pos 70114  
 Telepon : (0511) 335 0825, Fax. (0511) 335 4193  
 Email: dinsoskalselprov@gmail.com Website: dinsos.kalselprov.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG (ABPD)**  
 Nomor : 400.9.10.1/1004/ DINSOS / 2024

Pada hari ini Minggu Tanggal Sembilan Bulan Juni Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. Nama : **RIZDIE PRIMA SURYA, SE**  
 NIP : 19821101 201101 1 008  
 Jabatan : Kepala Seksi Perindungan Sosial Korban Bencana Alam Dinas Sosial Prov.Kalsel

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. Nama :  
 NIP :  
 Jabatan :

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menerangkan bahwa **PIHAK KESATU** telah menyerahkan barang bantuan Penanggulangan Bencana Alam kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima barang tersebut dari **PIHAK KESATU** dalam keadaan baik dan lengkap, berupa:

-----**TERLAMPIR**-----

Adapun barang bantuan tersebut sbbnya **BARANG PERSEDIaan HABIS PAKAI** yang digunakan untuk tujuan Bantuan Tanggap Darurat Banjir di Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

RIZDIE PRIMA SURYA, SE  
 NIP. 19821101 201101 1 008

Kepala Seksi Perindungan Sosial Korban Bencana Alam  
 Dinas Sosial Prov.Kalsel

Jampritan Berita Acara Serah Terima  
 Tanggal : 400.9.10.1/ 1004 / DINSOS / 2024  
 Tanggal : 09 Juni 2024

**REKAPITULASI PENGIRIMAN BARANG BANTUAN BENCANA ALAM**  
**KECAMATAN KINTAP KABUPATEN TANAH LAUT**

NO	NAMA BARANG	SATUAN	JUMLAH
1	MAKANAN ANAK 2024	PCKT	100
2	MAKANAN SMP SAJI A2023	PCKT	100
3	TENDA GULLING	LBR	10

Camat Kintap  
 Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

Kepala Seksi Perindungan Sosial Korban Bencana Alam  
 Dinas Sosial Prov.Kalsel  
**RIZDIE PRIMA SURYA, SE**  
 NIP. 19821101 201101 1 008

DINAS SOSIAL  
 RIZDIE PRIMA SURYA, SE  
 NIP. 19821101 201101 1 008

Gambar 8. Berita acara serah terima bantuan bencana alam pada Kecamatan Kintap Tahun 2024

Camat beserta kasi kemas dan kasi trantib mendampingi penyerahan bantuan dari Dinas Sosial dan BPBD kab Tanah laut serta bantuan dari Dinas Sosial Provinsi ke desa Muara Kintap.



Gambar 9. Fasilitasi bantuan korban terdampak banjir rob desa Muara Kintap

Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan sosial yang difasilitasi oleh kasi kemasyarakatan yaitu bantuan pangan nasional tahun 2024 yang didistribusikan ke 14 desa yang ada di kecamatan Kintap. Berikut dilampirkan salah satu berita acara serah terima penerima bantuan pangan

**BERITA ACARA SERAH TERIMA (BAST)**  
PENERIMA BANTUAN PANGAN - TAHUN 2024  
Nomor: DT-40416-00001  
Alokasi: DESEMBER 2024

Provinsi: KALIMANTAN SELATAN	Kabupaten: SEBAMAN BARU
Kab. / Kota: KAB. TANAH LAUT	Tanggal Paket: 50 Paket
Desa/Kelurahan: KINTAP	Tanggal Berah: 500 Kg

Bantuan Pangan - TAHUN 2024 diterima untuk disalurkan kepada PIP terlampir dibantu oleh pejabat setempat dan pendamping PIP.

\*Apakah Setempat adalah Pengurus RT / RW atau sebutan nama lainnya atau aparat Kelurahan/Desa  
\*\* Setempat yang sangat mendesak

KAB. TANAH LAUT	TRANSPORTER*
-----------------	--------------

( Nama, Jelas, TTD & Stempel )\*\*

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MELUKAI**  
PENGANTARAN PENERIMA BANTUAN PANGAN - TAHUN 2024  
Alokasi: DESEMBER 2024

Ting berlandaskan di bawah ini:

Nama: **Desa Perumahan Cendekia 5070**  
No. HP: **Indonesiastore.com dan Kintaman**  
Jabatan:   
Instansi:

Mengajukan dengan menggunakan bantuan:   
Saya bertanggung jawab terhadap penyaluran/pengantaran Penerima Bantuan Pangan dalam Program Bantuan Pangan Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional melalui Pemus BULOG/ Bulog di wilayah:

Kelurahan/Desa: **KALIMANTAN SELATAN**  
Kabupaten: **KALIMANTAN SELATAN**  
Kabupaten / Kota: **KAB. TANAH LAUT**  
Provinsi: **KALIMANTAN SELATAN**

Dengan penjamin sebagai berikut:

No	Nama PIP	Alamat	NIK	Nama PIP Pengganti	Alamat	NIK	Pekerjaan
1	ABDI BAHU	RT 15	6208010000000000000	PT NAG	Desa Cendekia 5070	6208010000000000000	IRT
2	ABDI BAHU	RT 15	6208010000000000000	PT NAG	Desa Cendekia 5070	6208010000000000000	IRT
3	ABDI BAHU	RT 15	6208010000000000000	PT NAG	Desa Cendekia 5070	6208010000000000000	IRT
4	ABDI BAHU	RT 15	6208010000000000000	PT NAG	Desa Cendekia 5070	6208010000000000000	IRT
5	ABDI BAHU	RT 15	6208010000000000000	PT NAG	Desa Cendekia 5070	6208010000000000000	IRT

Selengkapnya kepada PIP Pengganti di lampirkan BAST Pengganti sebagaimana terlampir.  
Demikian pernyataan ini saya buat dengan menggunakan:

Meningkatkan  
Yang membuat pernyataan\*  
( Tanda Tangan )\*\*  
**Abdi Bahu**  
Desa Cendekia 5070  
Agilasi setempat\*\*

Gambar 10. BA dan SPTJM penerima bantuan pangan dan penggantian penerima bantuan pangan

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Kemasyarakatan di Kec. Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (Satu) orang yaitu 1 orang Kasi Kemasyarakatan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang staf Non ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Kemasyarakatan yaitu memfasilitasi peningkatan pelayanan kesejahteraan sosial masyarakat dimana bentuk dari kegiatan tersebut adalah fasilitasi dan pendampingan

pemberian bantuan untuk korban terdampak bencana alam berupa banjir. Dan kegiatan koordinasi penyaluran bantuan sosial telah terlaksana melalui koordinasi pendistribusian bantuan pangan yang berasal dari Bulog

**b. Analisis Penggunaan Sumberdaya Anggaran Seksi Kemasyarakatan**

Dalam menjalankan kegiatannya Seksi Kemasyarakatan ditunjang dengan 1 (satu) Program 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan dengan anggaran Rp. 648.676.375,- (Enam ratus empat puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh enam tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan realisasi sebesar Rp. 633.980.750,- (enam ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 97,73%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 127. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	Rp. 648.676.375,-	Rp. 633.980.750,-	97,73 %
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
-	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kintap dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Kintap memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 138. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Kemasyarakatan Kecamatan Kintap Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	97,73%	2,27%

**c. Permasalahan yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial yaitu :**

Belum tertibnya pendataan di desa-desa untuk penerima bantuan sosial, sehingga bantuan sosial terkadang belum tepat sasaran kepada penerima.

**d. Solusi yang dilakukan dalam penyaluran bantuan sosial yaitu :**

Melakukan Sosialisasi Pertanggungjawaban, dan Pelaporan untuk bantuan sosial kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**e. Rencana Aksi yang akan dilakukan yaitu :**

Menyusun draft tahapan penyampaian dan verifikasi proposal,. Tanah Laut sehingga bantuan sosial berupa apapun dapat diterima oleh penerima yang tepat sasaran.

#### 4) Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Tabel 149. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1. Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	1 kejadian	1 Kejadian	100%	96,73 %
2. Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 Kejadian	100%	
3. Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah laporan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	8 Laporan	8 Laporan	100%	
<b>Rata-rata capaian kinerja tahun 2024</b>					<b>100%</b>

Sumber : Laporan Kinerja TW IV

Rumus Perhitungan :

1. Persentase gangguan kamtibmas yang tertangani

$$\text{Persentase Gangguan kamtibmas yang tertangani} = \frac{\text{Jumlah Gangguan kamtibmas yang ditangani}}{\text{Jumlah Gangguan kamtibmas yang ada}} \times 100$$

Salah satu upaya untuk meningkatkan pembinaan ketertiban umum di kecamatan adalah dengan melakukan pelatihan kelompok masyarakat dibidang ketenteraman dan ketertiban yang aktif melalui kelompok

perlindungan Masyarakat (Linmas) yang ada di 14 (empat belas) desa yang ada di kecamatan Kintap.



Gambar 11. Pelatihan Linmas Desa se Kecamatan Kintap

Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Kintap yang di monitoring selama tahun 2024 yaitu monitoring demo masyarakat desa Riam Adungan ke kantor DPRD Tanah Laut



Gambar 12. Demo masyarakat Desa Riam Adungan terkait sengketa dengan PT.Arutmin Indonesia Ke DPRD Tanah Laut .

Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan berhasil terealisasi pada Pilkada serentak tahun 2024, pada pilkada ini melibatkan banyak pihak sehingga untuk keamanan dan ketertiban pada saat sebelum dilakukan Pemilu dan pada saat Pemilu dilakukan, sehingga diperlukan pihak keamanan antara lain TNI, Polri dan Satpol PP serta pihak dari kecamatan untuk melakukan patroli ke setiap desa untuk memastikan terselenggaranya pilkada aman, tertib dan damai.



Gambar 13. Monitoring pilkada ke desa Kebun Raya

Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat dan Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan di wujudkan dengan kegiatan Forum Kerukunan Umat Beragama tentang sosialisasi Manajemen Konflik Beragama di Kecamatan dan Sosialisasi tentang bahaya Narkoba apabila di salahgunakan. Dalam rangka sosialisasi ini diharapkan murid-murid SLTA menjauhi narkoba dan jangan sampai terpengaruh untuk mendekati Narkoba.



Gambar 14. Sosialisasi Forum Kerukunan Umat Beragama



Gambar 15. Sosialisasi Penyalahgunaan Narkoba

- a. **Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kec. Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 1 (satu) orang yaitu 1 orang Kasi Trantib (Pejabat Pengawas) dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Ketentraman dan Ketertiban yaitu melakukan kegiatan fasilitasi penanganan gangguan dan keamanan, membina kelompok masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban, sosialisasi dan monitoring penanganan gangguan ketentaman dan ketertiban .

**b. Analisis mengenai Sumber Daya Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Dalam menjalankan Kegiatan Seksi Ketentraman dan ketertiban di tunjang dengan 2 (dua) Program, 2 (dua) Kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan, dengan total anggaran Rp. 165.410.460,- (Seratus enam puluh lima juta empat ratus sepuluh ribu empat ratus enam puluh rupiah) terealisasi sebesar Rp. 135.319.000,- (seratus tiga puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sebesar 82,05%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 40. Realisasi Program Penunjang pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
1.	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Rp. 25.638.000,-	Rp. 23.715.000,-	96,73%
a.	Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			
-	Sinkronisasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 25.638.000	Rp. 23.715.000	92,50 %
2	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	Rp 40.600.000	Rp. 30.635.000	75,45%
a.	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Rp. 40.600.000	Rp. 30.635.000	75,45%
-	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Rp.40.600.000	Rp.30.635.000	75,46%

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Persentase Capaian (%)
	Total Anggaran	Rp. 66.238.000,-	Rp. 54.350.000,-	82,05%

Dalam mencapai capaian kinerja pada seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap dengan realisasi capaian kinerja 100%, Kecamatan Kintap memiliki efisiensi anggaran dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 41. Tabel Efisiensi Capaian Kinerja dan Anggaran pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kintap Tahun 2024

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	82,05%	17,95%

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Masih minimnya keinginan para pemuda untuk bergabung dalam kelompok perlindungan masyarakat sehingga (Linmas), yang mengakibatkan tidak ada regenerasi untuk kelompok perlindungan masyarakat tersebut

**d. Solusi atas Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Ketentraman dan Ketertiban**

Melakukan sosialisasi dan bimbingan kepada masyarakat dengan meminta bantuan dan dukungan dari para tokoh pemuka agama, tokoh masyarakat beserta forkompimcam Kecamatan Kintap untuk menjaga Ketentraman dan ketertiban. Dan mengajak para pemuda untuk bergabung dalam kelompok Linmas.

**e. Rencana Aksi yang akan dilaksanakan Seksi Ketentraman dan Ketertiban yaitu :**

Melakukan sinergi dan koordinasi kepada seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, dalam mensosialisasikan Peraturan Daerah

**5) Kepala Seksi Pelayanan**

**1. Rumus Perhitungan**

$$\text{Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah Objek pelayanan yg diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah objek pelayanan yang ada}} \times 100$$

Pencapaian Sasaran strategis Kasi Pelayanan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran strategis Kecamatan Kintap, salah satu kegiatan yang dilaksanakandalam program ini adalah melakukan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM),dimana hasil dari pelaksanaan SKM ini adalah untuk mengukur keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kintap Tahun 2024 yakni nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dimana Kecamatan Kintap pada Tahun 2024 memperoleh IKM sebesar 88,79 dengan mutu pelayanan berkategori sangat baik.

Tabel 42. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Seksi Pelayanan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1. Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	0
2. Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	100%	0
<b>Rata-rata capaian kinerja tahun 2024</b>					<b>100%</b>

Berikut adalah tabel efisiensi anggaran untuk seksi pelayanan :

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	0%	100%

Memberikan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) pada tahun 2024 sebanyak 12 Jenis Produk Pelayanan dapat terealisasi penuhnya (100%). Adapun jenis pelayanan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Pelayanan pembuatan rekomendasi
2. Pelayanan perekaman pembuatan KTP elektronik
3. Pelayanan pembuatan KK (Kartu Keluarga)
4. Pelayanan legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
5. Pelayanan Surat Keterangan Pindah
6. Pelayanan Surat Keterangan Kematian
7. Pelayanan Legalisasi pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)

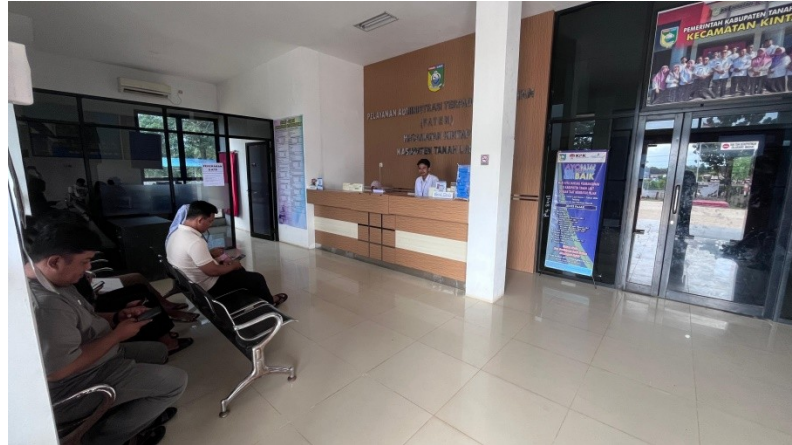
8. Pelayanan Legalisasi pembuatan Surat Ijin Keramaian
9. Pelayanan pembuatan Surat Dispensasi Nikah
10. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
11. Pelayanan legalisasi pembuatan SKCK
12. Pelayanan legalisasi surat lainnya.

PATEN telah menerapkan sistem pelayanan 1 (satu) pintu dimana Seksi Pelayanan menjadi pintu utama pendistribusian segala jenis administrasi pelayanan dan administrasi perkantoran di Kantor Kecamatan Kintap. Jumlah Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SOP sebanyak 12 jenis pelayanan dengan capaian target 100%. Volume / Jumlah Pelayanan administrasi kependudukan dan Legalisasi Surat, ditentukan oleh aktivitas dan kebutuhan masyarakat di Kecamatan Kintap. Untuk lebih jelasnya jenis pelayanan dan realisasi pelayanan tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 43. Realisasi Pelayanan Kantor Kecamatan Kintap Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Jumlah pelayanan	Keterangan
1	Perekaman KTP	231 Orang	Seksi Pelayanan
2	Penerbitan Kartu Keluarga	180 Orang	Seksi Pelayanan
3	Pengantar Surat Keterangan Pindah	65 Surat	Seksi Pelayanan
4	Dispensasi Nikah	50 Surat	Seksi Kemasyarakatan
5	Rekomendasi	40 Surat	Seksi Pelayanan
6	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	18 Surat	Seksi Pelayanan
7	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)	0 surat	Seksi Trantib
8	Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris	63 Surat	Seksi Kemasyarakatan
9	Pelayanan Surat Izin Keramaian	36 Surat	Seksi Trantib
10	Surat Keterangan Lain Lain	5 Surat	Seksi Pelayanan
11	Surat Masuk	826 Surat	Seksi Pelayanan
12	Surat Keluar	596 Surat	Seksi Pelayanan
13	Surat Pengantar	226 Surat	Seksi PMD

Data Informasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang disusun dalam bentuk laporan kegiatan seksi Pelayanan. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat pada Kecamatan Kintap Tahun 2024 dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,79% dari 150 responden yang mengisi kuisisioner.



Gambar 16. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Seksi Pelayanan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Seksi pelayanan di Kec. Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 3 (tiga) orang yaitu 1 orang Plt. Kasi pelayanan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 (dua) orang staf Non ASN dengan menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasi Pelayanan yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Kasi Pelayanan**

Pada tahun 2024 seksi Pelayanan tidak mendapatkan anggaran dikarenakan keterbatasan anggaran sehingga untuk menunjang kegiatan tersebut memakai anggaran yang ada di sekretariat.

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi adalah belum adanya aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Kintap yang terhubung dengan Kelurahan dan Pemerintah Desa. Dan keterbatasan anggaran untuk menunjang pada seksi pelayanan.

**d. Solusi Permasalahan yang dihadapi pada Seksi Pelayanan**

Adapun solusi untuk memecahkan kendala yang dikemukakan diatas yaitu Mencoba mengembangkan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan Kintap.

Adapun rencana aksi untuk meningkatkan nilai Sakip yaitu :

- ❖ Berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut dalam mendorong pengembangan aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan.
- ❖ Melakukan pembuatan media sosial untuk mendukung informasi akan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan sebagai sarana informasi publik terhadap kinerja Kecamatan.
- ❖ Mengusulkan kembali anggaran di tahun 2025 untuk menunjang kegiatan pada seksi pelayanan.

**e. Rencana Aksi yang dilaksanakan pada Seksi Pelayanan**

Melakukan komitmen pelayanan yang kuat pada personel/SDM Kecamatan Kintap agar pelayanan terpadu kecamatan kepada masyarakat lingkup Kecamatan Kintap.

## 6) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Rumus Perhitungan :

1. %ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik

$$\frac{\% \text{ ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik}}{\text{Jumlah ASN yang ada}} = \frac{\text{Jumlah ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik}}{\text{Jumlah ASN yang ada}} \times 100$$

Tabel 44. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Umum dan Kepegawaian TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian perangkat daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	100%	100%	95,48
2. Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks kepuasan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100%	
3. Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah pnujng urusan pemeritah daerah sesuai penganggaran yang efisien	100%	100%	100%	
4. Memastikan pelayanan penunjang kantor	Indeks Kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah	100%	100%	100%	

tersedia dengan baik	daerah				
5. Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12 paket	12 paket	100%	
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Berikut adalah tabel efisiensi untuk anggaran pada Kasubbag Umum dan Kepegawaian :

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	95,48%	4,52%

Jumlah pegawai dilingkup Kantor Kecamatan Kintap sebanyak 21 (dua puluh satu) orang yaitu 12 (dua belas) orang ASN dan 9 (sembilan) orang PTT. Semua kebutuhan administrasi perkantoran terlayani dengan baik. Realisasi Target indikator kinerja mencapai 100%.

Jumlah sarana prasarana yang terpelihara dengan baik dan memadai sebagai sarana dan penunjang kegiatan sebanyak 185 unit yang terdaftar dalam inventarisasi barang dalam kondisi baik dan sisanya dalam kondisi rusak berat.

Jumlah dokumen administrasi kepegawaian sampai dengan per 31 Desember 2024 sebanyak 12 (dua belas) ASN. Administrasi kepegawaian saat ini sudah menggunakan aplikasi SIMPeg yang memudahkan proses pencatatan dan pengolahan data dan informasi kepegawaian yang diminta. Realisasi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahun 2024 sudah dilaksanakan penilaian oleh pimpinan sesuai tingkatannya dan ASN Lingkup Kecamatan Kintap tidak ada yang memiliki nilai rata-rata kurang atau sangat kurang.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun Anggaran 2024 antara lain melaksanakan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, serta pembayaran honorarium pegawai tidak tetap.

Berikut dilampirkan foto foto kegiatan yang ada di Sub Bagian Umum dan Kepegawaian



Gambar 17. Pengadaan Printer dan Komputer

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian di Kec. Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 5 (lima) orang yaitu 1 (Satu) orang Kasubbag Umum & Kepegawaian (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 1 (satu) orang orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 4 (dua) orang Non ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian yaitu melakukan kegiatan pelayanan administrasi perkantoran, pemenuhan sarana dan prasarana kantor, serta memberikan pelayanan administrasi kepegawaian.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Umum & Kepegawaian**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2024, sub bagian umum dan kepegawaian ditunjang oleh 1 (satu) program,

4 (empat) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 769.633.355,- (Tujuh ratus enam puluh sembilan enam ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 720.842.976,- (Tujuh ratus dua puluh juta delapan ratus empat puluh dua ribu Sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

Tabel 45. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	761.920.198,00	727.495.963,00	95,48
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.658.000	7.909.000	91
-	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000	7.909.000	91
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	335.624.310,00	325.000.081,00	96,83
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303,00	5.343.340,00	88,30
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.453.007,00	28.839.660,00	88,87
-	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	100
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	277.120.000,00	270.817.081,00	97,73
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	146.230.860,00	116.297.473,00	79,53
-	Pengadaan Mebel	4.890.491,00	4.171.603,00	85,30
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	57.569.859,00	54.545.000,00	94,75
-	Pengadaan sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	83.770.510,00	57.580.870,00	68,74
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	279.120.185,00	271.636.422,00	97,32
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.220.453,00	40.531.414,00	87,69
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.899.732,00	231.105.008,00	99,23

**c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Adapun permasalahan/kendala yang dihadapi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah kurangnya petugas staf/ASN pengelola kearsipan dalam mengerjakan tugas mengelola arsip di Kecamatan Kintap.

**d. Solusi permasalahan yang akan dilaksanakan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Melakukan usulan penambahan personel staf/ASN pengelola kearsipan yang mempunyai keahlian menyusun arsip, menata arsip, didukung sarana dan prasarana ruang arsip yang memadai.

**e. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Memberdayakan pegawai PTT yang ada membantu dalam mengelola kearsipan yang ada di Kecamatan Kintap.

**7) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan**

Tabel 156. Realisasi Target Sasaran, Indikator Program dan Kegiatan Sub Perencanaan dan Keuangan TA. 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	Persentase Capaian	Persentase Keuangan
1. Meningkatnya ketaatan penyusunan dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100%	100%	100%	83,60
2. Meningkatnya keselarasan dokumen perangkat daerah dengan Pemda	Indeks Kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	
Rata-Rata Capaian Kinerja					100%

Berikut adalah tabel efisiensi anggaran untuk Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Realisasi Kinerja	Realisasi Keuangan	Efisiensi
100%	83,60%	16,4%

Jumlah dokumen perencanaan kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain Dokumen Renstra 2024-2026, Dokumen Renja 2024, Dokumen Renja 2024 Perubahan, Dokumen DPA dan DPA-Perubahan 2024. Dengan demikian realisasi capaian target sesuai target (100%).

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku yaitu Laporan Kinerja Pemerintahan 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2024, Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) 2024 dan Laporan Keuangan semesteran dan

prognosis 2024. Dengan demikian realisasi capaian target mencapai 100%

Berikut ini adalah sebagian dokumentasi pada kegiatan sub bagian Perencanaan dan Keuangan Tahun 2024 dapat dilihat pada foto-foto berikut ini :



Gambar 18. Sosialisasi Penginputan Aplikasi E-SAKIP



Gambar 19. Rapat Evaluasi Internal Capaian Kinerja Kasi Triwulan IV

**a. Analisis mengenai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Sub Perencanaan dan Keuangan**

Dalam menjalankan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan di Kec. Kintap dengan jumlah personil ASN sebanyak 4 (empat) orang yaitu 1 orang Kasubbag Perencanaan dan Keuangan (Pejabat Pengawas) dengan dibantu 2 orang staf ASN (Jabatan Pelaksana) dan 1 (satu) orang Non ASN dengan kegiatan yang sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun menjalankan arahan dan kebijakan pimpinan. Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kasubbag Perencanaan dan Keuangan yaitu melakukan kegiatan perencanaan kinerja dan keuangan, laporan keuangan dan laporan kinerja.

**b. Analisis Penggunaan Sumber Daya Anggaran pada Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan**

Dalam menjalankan kegiatan selama tahun anggaran 2024, sub bagian Keuangan dan Perencanaan ditunjang oleh 1 (satu) program, 3 (tiga) kegiatan dan 8 (delapan) sub kegiatan dengan total anggaran Rp. 2.521.763.170,- (Dua milyar lima ratus dua puluh satu tujuh ratus enam puluh tiga ribu seratus tujuh puluh rupiah), dengan realisasi sebesar Rp. 2.030.720.003,- (Dua milyar tiga puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu tiga rupiah).

Tabel 47. Realisasi Program Penunjang pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No	Program	Pagu (Rp).	Realiasi (Rp).	Capaian Persentase (%)
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>3.291.396.525,00</b>	<b>2.751.562.979,00</b>	<b>83,60</b>
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.948.766,00	9.708.800,00	97,59
-	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.473.092,00	6.367.200,00	98,36
-	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674,00	3.341.600,00	96,14
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.412.389.318,00</b>	<b>1.923.375.928,00</b>	<b>79,73</b>
-	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.408.919.259,00	1.920.057.928,00	79,71
-	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.470.059,00	3.318.000,00	95,62
C	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	99.425.086,00	97.635.275,00	98,20
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	36.971.800,00	99,92
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.500.000,00	47.088.475,00	99,13
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000,00	10.450.000,00	90,09
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086,00	3.125.000	93,98

- c. Kendala/Permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**
1. Aplikasi yang dipakai masih di bagian perencanaan dan keuangan masih sering mengalami eror sehingga menghambat waktu pengerjaan laporan.
  2. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan bagi staf subbag perencanaan dan keuangan dalam update peraturan perundangan bidang perencanaan pembangunan daerah, bidang pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan daerah untuk menyusun laporan sesuai tahapan dan jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan manual maupun aplikasi yang telah disediakan oleh kemendagri RI dan Kemenkeu RI.
- d. Solusi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**
1. Sering melakukan komunikasi kepada pemegang aplikasi terkait kendala yang dialami.
  2. Melakukan usulan anggaran kepada SKPD terkait mengenai pendidikan dan pelatihan bagi staf/ASN Subbag Perencanaan dan Keuangan mengikuti Bimtek, Diklat bidang perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan daerah
- e. Rencana aksi permasalahan yang dihadapi pada Sub Bagian Umum Perencanaan dan Keuangan**
1. Melakukan transfer *knowledge* kepada staf/ASN subbag perencanaan dan keuangan dalam rangka pemerataan pembagian tugas dan pekerjaan agar penyelesaian kerja menjadi tepat waktu sesuai aturan perundangan-undangan.
  2. Melakukan pemanfaatan staf/ASN perencanaan dengan menggunakan hardware, software untuk penyusunan perencanaan daerah, pengelolaan penatausahaan pertanggungjawaban, pelaporan keuangan daerah sebagai

SKPD yang mempunyai kewajiban melaporkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi terhadap target tahun 2024 untuk eselon IV mencapai 100 %.

### **1. Perbandingan realisasi dengan target**

Dari hasil realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 dibandingkan tahun 2024 ada beberapa capaian yang mengalami kenaikan, dan beberapa capaian yang tidak bisa dibandingkan karena pada tahun 2023 tidak mencakup indikator kinerja yang ada di 2024.

Sebaliknya realisasi target sasaran dan indikator kinerja eselon IV tahun 2023 melampaui target seperti Jumlah ASN yang administrasi perkantornya terlayani dengan baik (100 %).

Dengan terbukanya informasi publik berimplikasi pada transparansi pemerintah dalam membuat sebuah aturan atau kebijakan. Sementara itu, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap langkah-langkah yang diambil pemerintah, baik dalam bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan, maupun laporan masyarakat terhadap suatu tindak pelanggaran bisa disampaikan melalui layanan pengaduan.

#### **1) Perbandingan realisasi dengan Realisasi Terkait**

Realisasi kinerja berdasarkan rata-rata capaian tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, pada tahun 2024 rata-rata capaian kinerja mencapai 100% atau sebesar 99,80% dibandingkan tahun 2023 yang sebesar 99,72%

#### **2) Analisis Peningkatan dan Penurunan Kinerja**

Pencapaian sasaran strategis pada Indeks Kepuasan Masyarakat mengalami sedikit peningkatan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 nilai IKM kecamatan Kintap sebesar 88,64. Peningkatan ini terjadi karena lebih banyak masyarakat yang mengurus berkas-berkas kependudukan atau surat menyurat lainnya di kecamatan Kintap.

#### **3) Analisis Program/Kegiatan Penunjang Kinerja**

Dari 4 (empat) program, 10 (sepuluh) kegiatan, dan 23 (dua puluh tiga) sub kegiatan yang diamanatkan kepada Kecamatan Kintap Tahun 2024 yaitu Pagu APBD Murni Awal sebesar Rp. 3.813.529.466.- setelah APBD perubahan menjadi sebesar Rp. 4.123.438.360,- terjadi kenaikan anggaran sebesar

7,52%. Sedangkan Realisasi belanja sebesar Rp. 3.538.187.729,- dengan capaian sebesar 85,81 % dari pagu Perubahan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Realisasi Anggaran Kecamatan Kintap yang ada pada tabel di bawah ini.

Tabel 168. Realisasi Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
<b>7.01.01</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>2.872.815.015,00</b>	<b>3.291.396.525,00</b>	100,00%	3.291.396.525,00	99,93%	2.751.562.979,00	83,60
<b>7.01.01.2.01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>9.948.766</b>	<b>9.948.766</b>	100,00%	<b>9.948.766</b>	100,00%	9.708.800,00	97,59
7.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6.473.092	6.473.092	100,00%	6.473.092	100,00%	6.367.200,00	98,36
7.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.475.674	3.475.674	100,00%	3.475.674	100,00%	3.341.600,00	96,14
<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>2.142.389.318,00</b>	<b>2.412.389.318,00</b>	100,00%	2.412.389.318,00	100,00%	1.923.375.928,00	79,73
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.138.919.259,00	2.408.919.259,00	100,00%	2.408.919.259,00	100,00%	1.920.057.928,00	79,71
7.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3.470.059,00	3.470.059,00	100,00%	3.470.059,00	100,00%	3.318.000,00	95,62
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>8.658.000,00</b>	<b>8.658.000,00</b>	100,00%	8.658.000,00	100,00%	7.909.000,00	91,35
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	8.658.000,00	8.658.000,00	100,00%	8.658.000,00	100,00%	7.909.000,00	91,35
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>259.824.310,00</b>	<b>335.624.310,00</b>	100,00%	335.624.310,00	98,27%	420.022.456,00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.051.303,00	6.051.303,00	100,00%	7.262.410,00	100,00%	6.534.500,00	89,98%
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.453.007,00	32.453.007,00	100,00%	152.254.824,00	100,00%	134.211.068,00	88,15%
7.01.01.2.06.07	Penyediaan Bahan/Material	20.000.000,00	20.000.000,00	100,00%	9.967.440,00	100,00%	8.905.000,00	89,34%
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	201.320.000,00	277.120.000,00	100,00%	235.000.000,00	96,70%	233.984.443,00	99,57%
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>146.230.860,00</b>	<b>116.297.473,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>116.297.473,00</b>	100,00%	<b>116.297.473,00</b>	<b>79,53%</b>
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	4.890.491,00	4.890.491,00	<b>100,00%</b>	4.890.491,00	100,00%	<b>4.171.603,00</b>	<b>85,30%</b>
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	68.558.859,00	57.569.859,00	100,00%	57.569.859,00	100,00%	54.545.000,00	94,75%
<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>279.120.185,00</b>	<b>279.120.185,00</b>	100,00%	<b>279.120.185,00</b>	100,00%	271.636.422,00	97,32%
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	46.220.453,00	46.220.453,00	100,00%	46.220.453,00	100,00%	40.531.414,00	87,69%
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	232.899.732,00	232.899.732,00	100,00%	232.899.732,00	100,00%	231.105.008,00	99,23%
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang</b>	<b>99.425.086,00</b>	<b>99.425.086,00</b>	100,00%	<b>99.425.086,00</b>	100,00%	97.635.275,00	98,20%

Tabel 168. Realisasi Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
	<b>Urusan Pemerintahan Daerah</b>							
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	37.000.000,00	37.000.000,00	100,00%	37.000.000,00	100,00%	36.971.800,00	99,92%
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.500.000,00	47.500.000,00	100,00%	47.500.000,00	100,00%	47.088.475,00	99,13%
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	11.600.000,00	11.600.000,00	100,00%	11.600.000,00	100,00%	10.450.000,00	90,09%
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	3.325.086,00	3.325.086,00	100,00%	3.325.086,00	100,00%	3.125.000,00	93,98%
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>6.842.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.02.02.01</b>	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.01.02.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>6.842.808,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.01.03.2.01.02</b>	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintaha dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	6.842.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>0,00</b>	<b>25.638.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.638.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.715.000,00</b>	<b>92,50%</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>0,00</b>	<b>25.638.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>25.638.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23.715.000,00</b>	<b>92,50%</b>
7.01.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0,00	25.638.000,00	100,00%	25.638.000,00	100,00%	23.715.000,00	92,50%
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN</b>	<b>799.776.375,00</b>	<b>689.276.375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>689.276.375,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>745.584.750,00</b>	<b>94,56%</b>

Tabel 168. Realisasi Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2024

Kode Rekening	Program/Kegiatan	Pagu (Rp)		Target s.d Tw IV		Realisasi		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Fisik	Keuangan	Fisik (%)	Keuangan	
				(%)	(Rp)		Rp	%
	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>							
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>799.776.375,00</b>	<b>689.276.375,00</b>	100,00%	<b>689.276.375,00</b>	100,00%	<b>745.584.750,00</b>	<b>94,56%</b>
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	759.176.375,00	648.676.375,00	100,00%	648.676.375,00	100,00%	633.980.750,00	97,73%
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	40.600.000,00	40.600.000,00	100,00%	40.600.000,00	100,00%	30.635.000,00	75,46%
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>17.955.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>17.955.000,00</b>	100,00%	17.325.000,00	96,49%
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>28.080.000,00</b>	<b>17.955.000,00</b>	100,00%	<b>17.955.000,00</b>	100,00%	17.325.000,00	96,49%
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12.880.000,00	12.880.000,00	100,00%	12.880.000,00	100,00%	12.600.000,00	95,07%
7.01.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	15.200.000,00	5.075.000,00	100,00%	5.075.000,00	100,00%	4.725.000,00	93,10%
		<b>3.813.529.466</b>	<b>4.123.438.360</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.123.438.360</b>	<b>99,93%</b>	<b>3.538.187.729</b>	<b>85,81%</b>

## B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

### 1. Anggaran dan Realisasi APBD 2024

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan, Kecamatan Kintap pada tahun 2024 mengalokasikan jumlah Anggaran Belanja sebelum perubahan sebesar Rp. 3.813.529.466.-.

Setelah pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan anggaran belanja sebesar Rp. 4.123.438.360,- dengan Realisasi belanja sebesar Rp. 3.538.187.729,- dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,81% dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 559.612.631.- (14,19%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 49. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kantor Kecamatan Kintap Tahun Anggaran 2024

No.	URAIAN	PAGU MURNI 2024	PAGU PERUBAHAN 2024	REALISASI (Rp).	(%)
1	BELANJA	3.813.529.466,-	4.123.438.360,-	3.538.187.729,-	85,81
	a. BELANJA OPERASI	3.740.080.116,-	3.977.207.500,-	3.421.890.256,-	86,03
	b. BELANJA MODAL	73.449.350,-	146.230.860,-	116.297.473,-	79,53

Tabel 50. Sasaran Strategis, Program, Pagu dan Realisasi Kecamatan Kintap

No	Sasaran Strategis	Program Prioritas			
		Program	Anggaran (Rp).	Realisasi (Rp).	Persentase (%)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 3.291.396.525	Rp 2.751.562.979	83,60
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	Program Koordinasi dan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 25.638.000	Rp 23.715.000	92,50
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 788.448.835	Rp 745.584.750	94,56
		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 17.955.000	Rp 17.325.000	96,49
<b>JUMLAH</b>			<b>4.123.438.360</b>	<b>3.538.187.729</b>	<b>85,81</b>

Dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 95,65% maka realisasi keuangan sebesar 85,81 menunjukkan adanya efisiensi penggunaan dana dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 51. Realisasi Persentase Keuangan, Fisik dan Efisiensi Sasaran Strategis Kecamatan Kintap Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	% Keuangan	% Fisik	% Efisiensi
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Kintap	83,60	99,84	12,94
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan Pemberdayaan Kecamatan Serta Pelayanan Publik	94,51	100	13,01

## 2. Perbandingan Program dan Kegiatan Tahun 2023 dan 2024

Pada tahun 2023 ada 4 Program dan 9 kegiatan dan 23 Sub Kegiatan, dibandingkan tahun 2024 ada 4 program dan 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Adapun untuk anggaran tahun 2024 sebesar Rp. 4.123.438.360 ,- (empat milyar seratus dua puluh tiga empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh rupiah) mengalami penurunan dibandingkan anggaran tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 5.240.486.010,- (Lima milyar dua ratus empat puluh juta empat ratus delapan puluh enam juta sepuluh rupiah). Untuk lebih jelasnya perbandingan jumlah Program dan Kegiatan dan pagu 2023 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Perbandingan Program dan Kegiatan serta Pagu Anggaran Kecamatan Kintap Tahun 2023-2024

TAHUN 2023			TAHUN 2024		
Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan
4	7	23	4	10	24
Total Anggaran			Total Anggaran		
Rp. 5.240.486.010 ,-			Rp4.123.438.360,-		

Adapun realisasi Belanja pada tahun 2024 sebesar Rp. 3.538.187.729,- (Tiga milyar lima ratus tiga puluh delapan juta seratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh sembilan rupiah) dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 4.756.796.603,-. (Empat milyar tujuh ratus lima puluh enam juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus tiga rupiah) mengalami penurunan realisasi dibanding tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Perbandingan Realisasi Belanja dan Pendapatan pada Kecamatan Kintap Tahun 2023-2024

NO.	URAIAN	REALISASI (Rp)	
		2023	2024
1.	<b>PENDAPATAN</b>	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	Rp. 0,-	Rp. 0,-
	Retribusi Daerah	Rp. 0,-	Rp. 0,-
2.	<b>BELANJA</b>	Rp. 5.153.221.422,-	Rp. 3.977.207.500,-
	<b>BELANJA OPERASI</b>	Rp. 5.153.221.422,-	Rp. 3.977.207.500,-
	Belanja Pegawai	Rp. 2.072.920.647,-	Rp. 2.408.919.259,-

	Belanja Barang dan Jasa	Rp. 2.237.720.775,-	Rp. 1.066.288.241,-
	Belanja Hibah	Rp. 842.580.000,-	Rp 502.000.000,-
	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>Rp. 87.264.588,-</b>	<b>Rp. 146.230.860,-</b>
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 80.564.588,-	<b>Rp. 146.230.860,-</b>
	Belanja Modal Bangunan dan Gedung	Rp. 6.700.000,-	Rp. 0,-

## BAB IV PENUTUP

### A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan RPD 2024 – 2026.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian terhadap **2 Sasaran 3 Indikator Kinerja Utama dengan tingkat capaian kinerja sangat memuaskan. Indikator kinerja program yang terdiri dari 3 sasaran dan 23 Indikator kinerja** yang sudah diuraikan dalam Bab III Akuntabilitas Kinerja dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja seluruh indikator sementara adalah 100,28% dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	RATA-RATA CAPAIAN (%)
Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	0,21	0,35	166,66	118,74
	Indeks Kepuasan Masyarakat	90	88,79	98,65	
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	70	63,65	
<b>SEKRETARIS CAMAT</b>					
Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan Kintap	Nilai Komponen Perencanaan	24	21,10	87,91	83,81
	Nilai Komponen Pengukuran	24	15,90	66,25	
	Nilai Komponen Pelaporan	12	8,40	70	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal	20	19,25	96,25	
	Hasil Survei pelayanan (IKM)	90	88,79	98,65	
<b>KASUBBAG UMPEG</b>					
Meningkatnya kualitas layanan Kepegawaian Perangkat Daerah	% ASN yang terlayani kepegawaiannya dengan baik	100%	100%	100	100
Menciptakan pelayanan administrasi umum yang optimal	Indeks kepuasan pelayanan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	100	
Memastikan pengadaan barang milik daerah sesuai dengan kebutuhan	Indeks kepuasan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai penganggaran yang efisien	100%	100%	100	
Memastikan pelayanan penunjang kantor tersedia dengan baik	Indeks kepuasan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	RATA-RATA CAPAIAN (%)
Tersedianya pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	12 Paket	12 Paket	100	
<b>KASUBBAG PERENKEU</b>					
Meningkatnya Ketaatan Penyusunan Dokumen	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	100 %	100%	100	100
Meningkatnya Keselarasan dokumen Perangkat Daerah dengan Pemda	Indeks kepuasan pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	100%	100	
<b>KASI TATA PEMERINTAHAN</b>					
Terwujudnya desa yang tertib administrasi	Persentase desa yang tertib administrasi	100%	100%		100%
Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	17 orang	100%	100	
<b>KASI PMD</b>					
Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat	Persentase BUMDesa yang operasionalnya berjalan baik	100%	100%	100	100
Terlaksananya efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	1 Laporan	1 Laporan	100	
Terlaksananya fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	2 dokumen	2 dokumen	100	
Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	24 dokumen	24 dokumen	100	
<b>KASI KEMASYARAKATAN</b>					
Meningkatnya pelayanan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat	Persentase PPKS yang terfasilitasi	100%	100%	100	100
Terlaksananya koordinasi penyaluran bantuan sosial	Jumlah koordinasi penyaluran bantuan sosial	2 kali	2 Kali	100	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)	RATA-RATA CAPAIAN (%)
<b>KASI TRANTIB</b>					
Meningkatnya pembinaan ketertiban umum di kecamatan	Jumlah gangguan kamtibmas yang tertangani	1 kejadian	1 kejadian	100	100
Terlaksananya sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	100	
Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah laporan tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	8 laporan	8 laporan	100	
<b>KASI PELAYANAN</b>					
Terlaksananya fasilitasi pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar	Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100	100
Terfasilitasinya percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	100	
Rata-rata Capaian Kinerja Keseluruhan					100,28

Dari tabel tersebut maka capaian kinerja Kantor Kecamatan Kintap berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori Sangat Tinggi.

## B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Adapun strategi peningkatan kinerja dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan komitmen Pimpinan dan seluruh jajaran dalam meningkatkan penerapan SAKIP lingkup SKPD Kecamatan Kintap
2. Meningkatkan komitmen dan kerjasama di dalam organisasi Kecamatan Kintap dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
3. Membangun Budaya Kerja yang merubah *mind set* Aparatur Sipil yang dulunya berorientasi kepada Anggaran berubah kepada Capaian Kinerja yang menunjang visi misi Kabupaten.
4. Melakukan penyempurnaan pada keselarasan penjabaran kinerja (*cascadedown*), mulai dari level SKPD sampai dengan indikator kinerja level eselon III, eselon IV dan individu pegawai.

5. Meningkatkan SDM baik dari segi kuantitas dan kualitas yaitu dengan meminta tambahan pegawai baru dan mengikutsertakan dalam Diklat/Bimtek bagi pegawai lama.
6. Meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan publik dan terus menjaga dan meningkatkan peran aktif dari semua aparatur kecamatan serta komitmen untuk membangun kecamatan khususnya dan daerah pada umumnya
7. Demikian laporan kinerja Kecamatan Kintap ini dibuat semoga dapat menjadi bahan informasi untuk pengambilan keputusan dalam rangka peningkatan kinerja.

Kintap, 16 Januari 2024



## LAMPIRAN

### LKj KECAMATAN KINTAP TAHUN 2024

#### 1. IKU

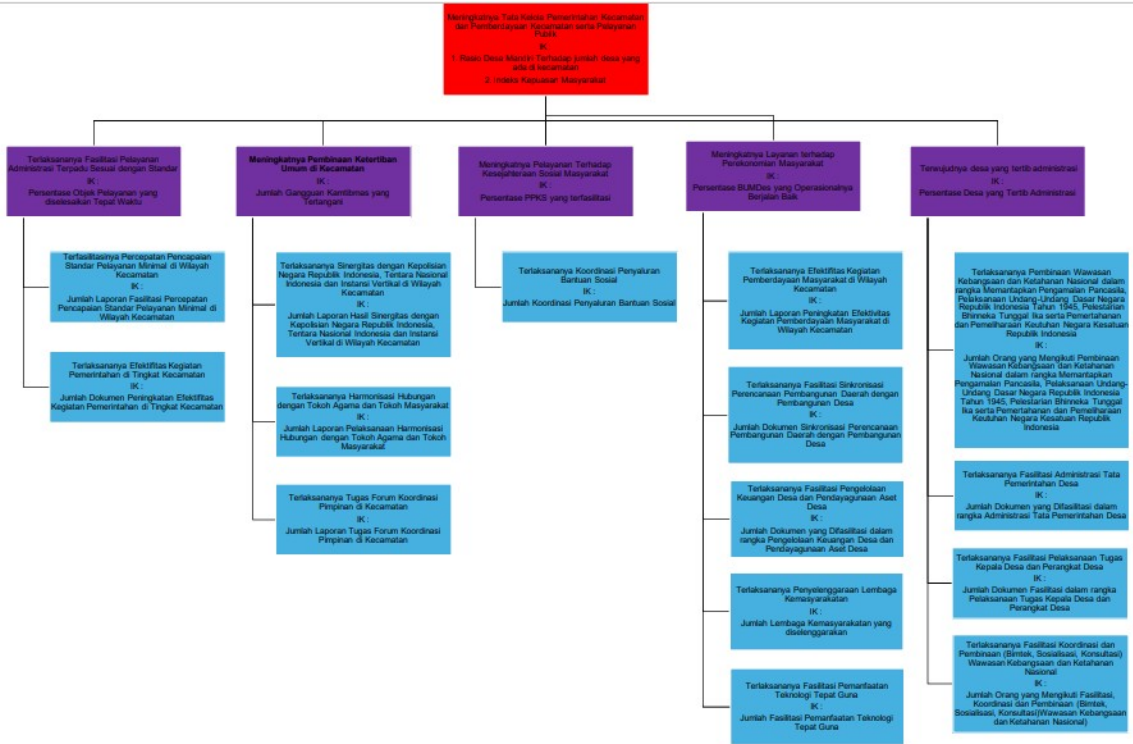
##### Indikator Kinerja Utama Kecamatan

Kabupaten	: Tanah Laut
Nama SKPD	: Kecamatan Kintap
Tugas	: Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah
Fungsi	: a. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum; b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat. c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang- undangan. e. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum. f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. g. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan h. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan; dan i. Pelaksanaan tugas pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

No.	Kinerja Utama/ Outcome/Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan Rumus	Penanggungjawab / Sumber Data
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik	1 Rasio Desa Mandiri Terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Jumlah Desa Mandiri/Jumlah Desa yang ada	Kecamatan
		2 Indeks Kepuasan Masyarakat	Hasil Survey	



#### 2. POHON KINERJA



### 3. PERJANJIAN KINERJA 2024



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON II  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Syamsir Rahman**  
Jabatan : **PJ. BUPATI TANAH LAUT**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
PJ. BUPATI TANAH LAUT

  
Syamsir Rahman

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
CAMAT KINTAP

  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

**PERJANJIAN KINERJA  
TUJUAN DAN KEGIATAN  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT APBD  
MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN STRATEGIS / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik</b>			
	1	Rasio desa mandiri terhadap jumlah desa yang ada di kecamatan	Nilai	0,21
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90
2	<b>Meningkatnya akuntabilitas kinerja internal kecamatan Kintap</b>			
	1	Nilai SAKIP Kecamatan Kintap	Nilai	70

**PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN**

7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

**ANGGARAN**

Rp. Rp 898.948.835,00

7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah

Rp. Rp 898.948.835,00

7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Rp. Rp 99.172.460,00

7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

Rp. Rp 759.176.375,00

7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Rp. Rp 0,00

7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Rp. Rp 40.600.000,00

7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

Rp. Rp 0,00

7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Rp. Rp 6.842.808,00

7.01.03.2.01 - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa

Rp. Rp 6.842.808,00

7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan

Rp. Rp 6.842.808,00

7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan

Rp. Rp 0,00

7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

Rp. Rp 0,00

7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

Rp. Rp 0,00

7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna

Rp. Rp 0,00

7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Rp. Rp 28.080.000,00

7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan

Pengawasan Pemerintahan Desa

Rp. Rp 28.080.000,00

## Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) ~

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Rp. Rp 0,00
7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp. Rp 12.880.000,00
7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp. Rp 15.200.000,00
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. Rp 0,00
7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Rp. Rp 0,00
7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. Rp 0,00
7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Rp. Rp 0,00
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. Rp 6.842.808,00
7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. Rp 6.842.808,00
7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Rp. Rp 6.842.808,00
7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Rp. Rp 0,00
7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Rp. Rp 0,00
7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Rp. Rp 0,00
7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Rp. Rp 0,00
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. Rp 2.872.815.015,00
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 9.948.766,00
7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. Rp 6.473.092,00
7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 3.475.674,00
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Rp 2.142.389.318,00
7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Rp 2.138.919.259,00
7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp 3.470.059,00
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 8.658.000,00
7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. Rp 8.658.000,00
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Rp 259.824.310,00
7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. Rp 6.051.303,00
7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Rp 32.453.007,00

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 73.449.350,00
7.01.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel	Rp. Rp 4.890.491,00
7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 68.558.859,00
7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 279.120.185,00
7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. Rp 46.220.453,00
7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. Rp 232.899.732,00
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 99.425.086,00
7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 37.000.000,00
7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 47.500.000,00
7.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 11.600.000,00
7.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 3.325.086,00

Pihak Kedua  
BUPATI TANAH LAUT



Syamsir Rahman

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama  
CAMAT KINTAN



SUTARNO S. Kep. Ns. MM  
NIP. 197310061996021001

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT ESELON III  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN PROGRAM / PROGRAM / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Kecamatan Kintap			
	1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	1	Nilai Komponen Perencanaan	Nilai	24
	2	Nilai Komponen Pengukuran	Nilai	24
	3	Nilai Komponen Pelaporan	Nilai	12
	4	Nilai Komponen Evaluasi Internal	Nilai	20
	5	Hasil Survei pelayanan (IKM)	Nilai	90

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7.01.01. Program PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. Rp 3.655.223.723,00
7.01.01.2.01. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.01.01. SubKegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.01.07. SubKegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.02. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. Rp 2.957.557.763,00
7.01.01.2.02.01. SubKegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. Rp 2.957.557.763,00
7.01.01.2.02.03. SubKegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. Rp 4.989.372,00
7.01.01.2.05. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. Rp 22.005.750,00
7.01.01.2.05.02. SubKegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. Rp 22.005.750,00
7.01.01.2.06. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. Rp 317.815.974,00
7.01.01.2.06.01. SubKegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. Rp 2.957.072,00
7.01.01.2.06.02. SubKegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. Rp 91.049.596,00
7.01.01.2.06.05. SubKegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. Rp 7.998.452,00
7.01.01.2.06.07. SubKegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp. Rp 21.838.659,00
7.01.01.2.06.09. SubKegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. Rp 190.000.000,00
7.01.01.2.07. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. Rp 88.610.036,00
7.01.01.2.07.01. SubKegiatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.07.05. SubKegiatan Pengadaan Mebel	Rp. Rp 39.810.389,00
7.01.01.2.07.06. SubKegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 62.070.712,00
7.01.01.2.07.09. SubKegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.07.10. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 14.304.596,00


PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN
7.01.01.2.07.11. SubKegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00
7.01.01.2.08. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 264.844.236,00
7.01.01.2.08.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. Rp 2.000.000,00
7.01.01.2.08.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. Rp 83.700.000,00
7.01.01.2.08.04. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. Rp 181.144.236,00
7.01.01.2.09. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. Rp 93.000.000,00
7.01.01.2.09.01. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. Rp 30.000.000,00
7.01.01.2.09.02. SubKegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. Rp 63.000.000,00
7.01.01.2.09.05. SubKegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp. Rp 6.440.000,00
7.01.01.2.09.06. SubKegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. Rp 11.724.000,00
7.01.01.2.09.10. SubKegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. Rp 0,00

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP



SUTARNOS, Kep. MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
SEKRETARIS CAMAT



YUSDI MURSALINSH  
NIP. 197312072006041011



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SRI CITRA RISNANIS.Sos**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061990021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN  
  
SRI CITRA RISNANIS.Sos  
NIP. 196702071992032012

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik			Rp 876.373.610,00
	1 Kegiatan : 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Rp 99.960.156,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Rp 1.119.595.094,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
	1 Jumlah Orang Yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya	Orang	2000	
3	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Rp 0,00
	3 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
4	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 45.648.670,00
	4 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
5	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Rp 13.634.840,00
	5 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KEMASYARAKATAN  
  
SRI CITRA RISNANIS.Sos  
NIP. 196702071992032012



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZANI FIQRIS.Sos**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PELAYANAN**

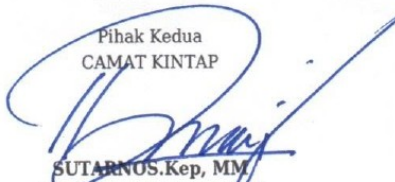
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PELAYANAN  
  
AZANI FIQRIS.Sos  
NIP. 197008061990021001

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik			Rp 6.842.808,00
	1 Kegiatan : 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	
2	Terwujudnya pelayanan administrasi terpadu sesuai dengan standar			Rp 4.986.066,00
	2 Kegiatan : 7.01.02.2.02 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan			Rp 4.986.066,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.02 - Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan			
	1 jumlah laporan fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	Laporan	12	
2	Terlaksananya Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			Rp 0,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.02.2.02.01 - Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan			
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Dokumen	1	

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP



**SUTARNOS.Kep. M.P.**  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PELAYANAN



**AZANI FIQRIS.Sos**  
NIP. 197008061990021001



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AHMAD YANISKM**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN  
DESA/KELURAHAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN  
  
AHMAD YANISKM  
NIP. 197404041999031009


**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Meningkatnya layanan terhadap perekonomian masyarakat			Rp 0,00
	1 Kegiatan : 7.01.03.2.01 - Koordinasi kegiatan pemberdayaan desa			
	1 Persentase BUMDes yang dibina	%	100	
2	Terwujudnya desa yang tertib administrasi			Rp 18.006.742,00
	2 Kegiatan : 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
	1 Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terlaksananya Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan			Rp 6.842.808,00
	1 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.02 - Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan			
	1 Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Dokumen	1	
2	Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			Rp 0,00
	2 Sub Kegiatan : 7.01.03.2.01.03 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	1 Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	
3	Terlaksananya Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa			Rp 9.450.000,00
	3 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			
4	Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa			Rp 8.556.742,00
	4 Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa			
	1 Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa	Dokumen	24	

## Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) ~

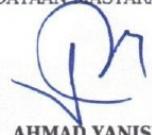
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
5	Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Rp 10.959.516,00
5	Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			
1	Jumlah Dokumen Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Dokumen	2	

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP



SUTARNAS Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA/KELURAHAN



AHMAD YANISKM  
NIP. 197404041999031009



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI USNADIA MD**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

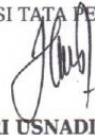
Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN  
  
HERI USNADIA MD  
NIP. 198411262006041002

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**


NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik</b>			Rp 6.842.808,00
	1 <b>Kegiatan : 7.01.02.2.01 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	
2	<b>Terwujudnya desa yang tertib administrasi</b>			Rp 18.006.742,00
	2 <b>Kegiatan : 7.01.06.2.01 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>			
	1 Persentase desa yang tertib administrasi	%	100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Koordinasi/Terlaksananya Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>			Rp 6.842.808,00
	1 <b>Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.01 - Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</b>			
	1 Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	
2	<b>Terlaksananya Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			Rp 0,00
	2 <b>Sub Kegiatan : 7.01.02.2.01.02 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</b>			
3	<b>Terlaksananya Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa</b>			Rp 9.450.000,00
	3 <b>Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.02 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa</b>			
	1 Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	Dokumen	14	
4	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset desa</b>			Rp 8.556.742,00
	4 <b>Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.03 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa</b>			
5	<b>Terlaksananya Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>			Rp 10.959.516,00
	5 <b>Sub Kegiatan : 7.01.06.2.01.09 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa</b>			

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP



**SUTARNOS.Kej/MM**  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI TATA PEMERINTAHAN



**HERI USNADIA MD**  
NIP. 198411262006041002



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HESTI SUSILO HASTUTIS.Sos**  
Jabatan : **KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN**

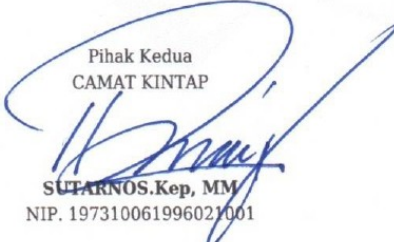
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**


Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

  
HESTI SUSILO HASTUTIS.Sos  
NIP. 197007301999032003

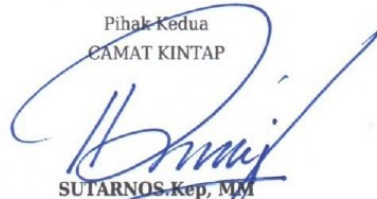
**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>			Rp 0,00
	1 <i>Kegiatan : 7.01.03.2.03 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</i>			
	1 Persentase Capaian Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	%	100	
2	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik</b>			Rp 14.908.832,00
	2 <i>Kegiatan : 7.01.04.2.01 - Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i>			
	1 Jumlah Laporan kamtibmas yang disusun	Laporan	10	
3	<b>Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan dan pemberdayaan Kecamatan serta pelayanan publik</b>			Rp 876.373.610,00
	3 <i>Kegiatan : 7.01.05.2.01 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>			
	1 Persentase objek pelayanan yang diselesaikan tepat waktu	%	100	

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</b>			Rp 0,00
	1 <i>Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.02 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan</i>			
	1 Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	
2	<b>Terlaksananya Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</b>			Rp 0,00
	2 <i>Sub Kegiatan : 7.01.03.2.03.05 - Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>			
3	<b>Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</b>			Rp 14.905.000,00
	3 <i>Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.01 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>			
	1 Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	
4	<b>Terlaksananya Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat</b>			Rp 14.908.832,00
	4 <i>Sub Kegiatan : 7.01.04.2.01.02 - Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>			
	1 Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat	Laporan	N/A	

## Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) –

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
5	Terlaksananya Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			Rp 99.960.156,00
	5 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.01 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Orang	11	
6	Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Rp 1.119.595.094,00
	6 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.04 - Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			
7	Terlaksananya Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			Rp 0,00
	7 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.05 - Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	1 Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	
8	Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			Rp 45.648.670,00
	8 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.08 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan			
	1 Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen	8	
9	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			Rp 13.634.840,00
	9 Sub Kegiatan : 7.01.05.2.01.02 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional			
	1 Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional"	Orang	20	

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNAS, Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN  
  
HESTI SUSILO HASTUTIS, Sos  
NIP. 197007301999032003



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HERI USNADIA MD**  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

  
HERI USNADIA MD  
NIP. 198411262006041002

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Rp 0,00
	1 <b>Kegiatan : 7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	1 Persentase Capaian Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	100	
2	<b>Meningkatnya Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			Rp 2.957.557.763,00
	2 <b>Kegiatan : 7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			
	1 Persentase Capaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	
3	<b>Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp 93.000.000,00
	3 <b>Kegiatan : 7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			
	1 Persentase Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Rp 0,00
	1 <b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.01 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</b>			
	1 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	7	
2	<b>Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			Rp 0,00
	2 <b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.01.07 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>			
	1 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	4	
3	<b>Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>			Rp 2.957.557.763,00
	3 <b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.01 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</b>			
	1 Jumlah orang yang menerima Gaji dan tunjangan ASN	Orang	12	
4	<b>Terlaksananya Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>			Rp 4.989.372,00
	4 <b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.02.03 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</b>			
	1 Jumlah dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	19	
5	<b>Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Jabatan</b>			Rp 30.000.000,00
	5 <b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.01 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			
	1 Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara	Unit	1	

## Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) -


NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
6	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp 63.000.000,00
	6 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.02 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	1 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan yang dipelihara	Unit	6	
7	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel			Rp 6.440.000,00
	7 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.05 - Pemeliharaan Mebel			
	1 Jumlah Mebel yang dipelihara	Unit	6	
8	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp 11.724.000,00
	8 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.06 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	1 Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	Unit	18	
9	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp 0,00
	9 Sub Kegiatan : 7.01.01.2.09.10 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
	1 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang direhabilitasi	Unit	2	

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP

  
SUTARNOS, Kep. M.4  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024

Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

  
HERI USNADIA MD  
NIP. 198411262006041002



**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AZANI FIQRIS.Sos**  
Jabatan : **KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **SUTARNOS.Kep, MM**  
Jabatan : **CAMAT KINTAP**

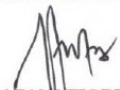
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep, MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

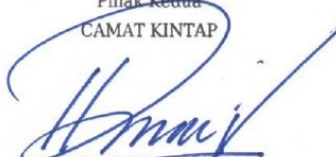
  
AZANI FIQRIS.Sos  
NIP. 197008061990021001

**PERJANJIAN KINERJA  
PEJABAT SUB KOORDINATOR  
KANTOR KECAMATAN KINTAP  
KABUPATEN TANAH LAUT  
APBD MURNI TAHUN 2024**

NO	SASARAN / KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			Rp 22.005.750,00
	1	<b>Kegiatan : 7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		
	1	Persentase Capaian Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	% 100	
2	<b>Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			Rp 317.815.974,00
	2	<b>Kegiatan : 7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	1	Persentase Capaian Administrasi Umum Perangkat Daerah	% 100	
3	<b>Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			Rp 88.610.036,00
	3	<b>Kegiatan : 7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	1	Persentase Capaian Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% 100	
4	<b>Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			Rp 264.844.236,00
	4	<b>Kegiatan : 7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	1	Persentase Capaian Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	% 100	
NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
1	<b>Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>			Rp 22.005.750,00
	1	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.05.02 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya</b>		
	1	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket 12	
2	<b>Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>			Rp 2.957.072,00
	2	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.01 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor</b>		
	1	Jumlah paket komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan	Paket 2	
3	<b>Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>			Rp 91.049.596,00
	3	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.02 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</b>		
	1	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket 2	
4	<b>Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan</b>			Rp 7.998.452,00
	4	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.05 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan</b>		
	1	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Paket 7	

## Elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (E-SAKIP) ~

NO	SASARAN / SUB KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	ANGGARAN
5	<b>Tersedianya Bahan/Material</b>			<b>Rp 21.838.659,00</b>
5	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.07 - Penyediaan Bahan/Material</b>			
1	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	3	
6	<b>Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			<b>Rp 190.000.000,00</b>
6	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.06.09 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</b>			
1	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	580	
7	<b>Terlaksananya Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</b>			<b>Rp 0,00</b>
7	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.01 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</b>			
1	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	2	
8	<b>Terlaksananya Pengadaan Mebel</b>			<b>Rp 39.810.389,00</b>
8	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.05 - Pengadaan Mebel</b>			
1	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	2	
9	<b>Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			<b>Rp 62.070.712,00</b>
9	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.06 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</b>			
1	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	3	
10	<b>Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			<b>Rp 0,00</b>
10	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.09 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			
1	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	
11	<b>Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			<b>Rp 14.304.596,00</b>
11	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.10 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			
1	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	
12	<b>Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			<b>Rp 0,00</b>
12	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.07.11 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</b>			
1	Jumlah unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	0	
13	<b>Tersedianya Jasa Surat Menyurat</b>			<b>Rp 2.000.000,00</b>
13	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.01 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat</b>			
1	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12	
14	<b>Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>			<b>Rp 83.700.000,00</b>
14	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.02 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik</b>			
1	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	Laporan	12	
15	<b>Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>			<b>Rp 181.144.236,00</b>
15	<b>Sub Kegiatan : 7.01.01.2.08.04 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</b>			
1	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	12	

Pihak Kedua  
CAMAT KINTAP  
  
SUTARNOS.Kep./MM  
NIP. 197310061996021001

Tanah Laut, 1 Juli 2024  
Pihak Pertama  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

  
AZANI FIQRIS.Sos  
NIP. 197008061990021001

### 4. EVALUASI HASIL RENJA TAHUN 2024 TW IV

Evaluasi Hasil Renja Tahun 2024  
TRIWULAN IV

No	Gejala	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Subst)	Target Mula Periode Kurva	Pencapaian Kinerja Periode sampai dengan Bulan	Target Kinerja dan Anggaran (Rp) yang dijabarkan				Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Kinerja yang dijabarkan (SDA)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja Tahun 2024 (%)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Kinerja di Tahun 2024/Revisi Tahun 2024 (Rp)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Kinerja di Tahun 2024 (%)	SDPD Peranginan/lemb	Keterangan						
						1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
<p><b>Senus Eding</b></p> <p><b>PROGRAM PENILAIAN STRUKTUR PEMERINTAHAN KABUPATEN KUNING</b></p>																									
			Perencanaan Sistem Subang administratif pemerintahan yang sesuai SOP (%)	80,00	11.853.241,270	0,00	0	3.201.348,025	704.270,880	726.127.178	851.764,087	776.386,025	- 2.701.582,879	0,00%	83,80%	91,00	2.711.982,879	22,37%	Kurang						
			Penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (jaringan)	100,00	20.929.707	0,00	100	5.946.704	3.800.433	-	-	-	- 6.806.402	0,00%	97,50%	0,00	9.708.881	3,00%	84,4%						
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Struktur)	100,00	18.024.388	0,00	7	6.472,000	1.088,000	2	-	2	-	1	4.670,200	7	6.367,200	100,00%	98,30%	7,00	6.367,200	0,00%	35,30%	Tidak Ada	
			Revisi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	11.925,371	0,00	4	3.475,074	1.114,400	-	-	-	2	2.227,200	4	3.341,800	100,00%	96,14%	4,00	3.341,800	0,00%	20,04%	Tidak Ada		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Pemer)	100,00	7.820.123.790	0,00	100	2.412.388,319	427.437,383	-	552.088,268	-	416.946,074	-	483.806,025	-	1.823.376,828	0,00%	78,73%	0,00	1.823.376,828	0,00%	93,47%		
			Penyediaan Upah dan Tunjangan ASN	100,00	7.809.826.858	0,00	11	2.438.018,203	455.846,783	12	552.088,268	12	416.946,074	12	482.173,325	47	1.823.027,938	100,00%	78,71%	47,00	1.823.027,938	0,00%	34,59%	Tidak Ada	
			Penyusunan, Pelaksanaan dan Pengawasan/lembaga Keuangan SDPD (Dokumen)	100,00	11.485.980	0,00	10	3.475,074	1.164,800	2	-	2	-	4	1.723,200	14	3.318,800	100,00%	95,62%	14,00	3.318,800	0,00%	38,98%	Tidak Ada	
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Pemer)	0,00	-	0,00	100	8.028,000	-	7.909,000	-	-	-	-	7.808,000	0,00%	91,30%	0,00	7.808,000	0,00%	9,00%				
			Pengadaan Pakaian Dinas Berserta Habis Kelayakannya	0,00	-	0,00	10	8.028,000	11	7.909,000	-	-	-	-	11	7.808,000	91,87%	91,30%	11,00	7.808,000	0,00%	9,00%	Tidak Ada		
			Administrasi Umum Perangkat Daerah (Pemer)	100,00	764.240,210	0,00	100	335.624,319	-	58.473,915	-	86.883,001	-	52.018,800	-	126.114,205	-	325.000,081	0,00%	96,82%	0,00	325.000,081	0,00%	134,01%	
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100,00	20.929,682	0,00	3	6.091,303	1	2.026,750	1	-	-	-	3.316,000	2	5.343,360	100,00%	88,30%	2,00	5.343,360	0,00%	26,04%	Tidak Ada	
			Penyediaan Fasilitas dan Peralengkapan Kantor	100,00	107.441,547	0,00	4	32.452,027	1	10.524,100	1	1.300,000	1	4.781,800	1	12.228,960	4	28.828,800	100,00%	98,87%	4,00	28.828,800	0,00%	26,94%	Tidak Ada
			Penyediaan Barang Cetak dan Pengoperasian	100,00	9.920,000	0,00	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%		Tidak Ada	
			Penyediaan Bahan Material	100,00	60.000,000	0,00	3	20.000,000	-	-	-	-	-	2	20.000,000	2	20.000,000	100,00%	100,00%	2,00	20.000,000	0,00%	33,33%	Tidak Ada	
			Penyediaan Biaya Rutin dan Konsumsi SDPD	100,00	927.840,000	0,00	10	277.128,000	3	46.918,125	3	85.983,001	3	47.721,200	3	90.568,700	10	270.817,081	100,00%	97,73%	10,00	270.817,081	0,00%	47,68%	Tidak Ada

	Pengaliran Barang Milik Daerah Penawar Uraian Pemenuhan Dasar	Pembelian Capaian Pengaliran Barang Milik Daerah Penawar Uraian Pemenuhan Dasar (Pasar)	100,00	2.027.300,00	0,00	-	180	146.220,80	-	58.716,80	-	-	-	-	-	57.580,878	116.207,473	0,00%	79,53%	0,00	116.207,473	0,00%	91,20%			
	Pengaliran Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihasilkan (Unit)		822.800,00	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Pengaliran Mebel	Jumlah Mebel yang Dihasilkan (% Unit)		55.900,00	0,00	-	1	4.886,49	1	4.171,602	-	-	-	-	-	-	4.171,602	100,00%	85,20%	1,00	4.171,602	0,00%	7,58%	Tidak Ada		
	Pengaliran Perabot dan Meubel Lainnya	Jumlah Unit Perabot dan Meubel Lainnya yang Dihasilkan (Unit)		90.000,00	0,00	-	4	57.588,89	4	54.545,000	4	-	-	-	-	-	54.545,000	100,00%	94,75%	8,00	54.545,000	0,00%	60,61%	Tidak Ada		
	Pengaliran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan (Unit)		800.000,00	0,00	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Pengaliran Gerbang dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gerbang dan Fasilitas Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dihasilkan (Unit)		200.000,00	0,00	-	14	83.770,313	-	-	-	-	-	-	-	-	57.580,878	14	57.580,878	100,00%	68,74%	14,00	57.580,878	0,00%	21,03%	Tidak Ada
	Penyediaan Jasa Perangko dan Pemeliharaan Dasar	Pembelian Capaian Penyediaan Jasa Perangko Uraian Pemenuhan Dasar (Pasar)	100,00	807.772,503	0,00	-	180	276.120,165	-	66.656,638	-	68.554,736	-	68.383,223	-	68.542,425	271.636,425	0,00%	97,32%	0,00	271.636,425	0,00%	63,19%			
	Penyediaan Jasa Surt Meryeng	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surt Meryeng (Laporan)		6.000,000	0,00	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Penyediaan Jasa Kimbarkin Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Kimbarkin, Sactar Daya Air dan Listrik yang Dihasilkan (Laporan)		143.264,281	0,00	-	12	46.220,463	3	9.110,614	3	10.126,958	3	10.380,803	3	10.719,847	12	49.531,414	100,00%	87,80%	12,00	49.531,414	0,00%	27,90%	Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran Jasa Pelayanan Umum Kantor (% Bulat)		606.508,222	0,00	-	12	232.888,710	3	57.545,424	3	57.814,778	3	57.822,368	3	57.822,428	12	231.105,688	100,00%	99,21%	12,00	231.105,688	0,00%	25,20%	Tidak Ada	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penawar Uraian Pemenuhan Dasar	Pembelian Capaian Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penawar Uraian Pemenuhan Dasar (Pasar)	100,00	404.492,300	0,00	-	180	96.426,086	-	31.261.100	-	15.121.179	-	13.913,000	-	17.340,000	97.636,276	0,00%	98,20%	0,00	97.636,276	0,00%	118,04%			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blok Pemeliharaan dan Pagar Kandang Perangko Dinas atau Kandang Dinas Jabatan	Jumlah Kandang Perangko Dinas atau Kandang Dinas Jabatan yang Dihasilkan dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)		600.000,000	0,00	-	1	37.000,000	-	16.811,809	1	6.845,000	-	4.415,000	-	5.880,000	1	36.971,800	100,00%	99,62%	1,00	36.971,800	0,00%	23,60%	Tidak Ada	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Blok Pemeliharaan Pagar dan Perabot Kandang Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kandang Dinas Operasional atau Lapangan yang Dihasilkan dan Dibayarkan Pagar dan Perabotnya (Unit)		180.000,000	0,00	-	4	47.500,000	-	25.944,200	2	5.256,175	2	6.048,000	2	9.940,000	4	47.088,475	100,00%	98,12%	4,00	47.088,475	0,00%	23,78%	Tidak Ada	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dihasilkan (Unit)		12.000,000	0,00	-	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	Tidak Ada		
	Pemeliharaan Perabot dan Meubel Lainnya	Jumlah Perabot dan Meubel Lainnya yang Dihasilkan (Unit)		15.400,000	0,00	-	20	11.000,000	6	5.400,000	4	-	4	3.400,000	4	1.800,000	20	10.400,000	100,00%	90,00%	20,00	10.400,000	0,00%	51,60%	Tidak Ada	
	Pemeliharaan/Rahibasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dihasilkan/Dirahibasi (Unit)		80.000,000	0,00	-	1	3.125,000	-	3.125,000	-	-	3	-	3	3.125,000	3	3.125,000	100,00%	93,84%	3,00	3.125,000	0,00%	4,75%	Tidak Ada	
																		Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	99,80%	93,00%						
																			Produktif Kinerja	Jangka Panjang	Tinggi					
	<b>RECAPITULASI</b>																									
	<b>PROGRAM PENYELINGKIHAN PEMERTAHAN DASAR PELAKSIAN PUBLIK</b>	HBI (Yulu)	91,00	20.520,000	0,00	-	82											0,00%	0,00%	90,00		0,00%		Kincaj		

	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemertahanan di Tingkat Kecamatan	Pemertahan Capaian Koordinasi Penyelenggaraan Pemertahanan di Tingkat Kecamatan (Pener)	100,00	20.530.000	0,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Koordinasi Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemertahanan dengan Perangkat Desa dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi Kegiatan Pemertahanan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemertahanan dengan Perangkat Desa dan Instansi Vertikal Terkait (Laporan)		20.530.000	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-0,00%	0,00%	Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																			Prekualifikasi Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	<b>PROGRAM FENELAYAN BASTARAKAT DESA DAN KELAYANAN</b>																			0,00%	0,00%	90,00	-	0,00%	Kinlay
			91,00	110.530.000	0,00	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa	Pemertahan Capaian Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa (Pener)		110.530.000	0,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
		Pemertahan capaian Koordinasi Kegiatan Pembedayaan Desa (Pener)			0,00	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	0,00%	0,00%	
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang dibuktikan oleh Pemertahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pembedayaan Masyarakat yang Dibuktikan oleh Pemertahan dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan (Dokumen)		20.530.000	0,00	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	1,00	-	-0,00%	0,00%	Tidak Ada
	Penggiatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Penggiatan Efektifitas Kegiatan Pembedayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan (Laporan)		90.000.000	0,00	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	-	-0,00%	0,00%	Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	0,00%	0,00%				
																			Prekualifikasi Kinerja	Sangat Rendah	Sangat Rendah				
	<b>PROGRAM KOGESING KETERANGAN DAN KETERANGAN UMUM</b>																			0,00%	90,00%	90,00	23.715.000	187,02%	Kinlay
			91,00	12.648.000	0,00	92	20.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-							
	Koordinasi Sapa Penyelenggaraan Keseluruhan dan Kelembagaan Umum	Pemertahan Capaian Koordinasi Sapa Penyelenggaraan Keseluruhan dan Kelembagaan Umum (Pener)		12.648.000	0,00	100	20.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00	23.715.000	187,02%	0,00%	
		Pemertahan capaian Koordinasi Sapa Penyelenggaraan Keseluruhan dan Kelembagaan Umum (Pener)			0,00	100													0,00%	0,00%	0,00		23.715.000	187,02%	0,00%
	Sejalan dengan Kegiatan Warga Republik Indonesia Temba Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sejalan dengan Kegiatan Warga Republik Indonesia Temba Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan (Laporan)		12.648.000	0,00	1	20.638.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	0,00%	1,00	23.715.000	187,02%	0,00%	Tidak Ada
																			Rata-Rata Capaian Kinerja (%)	90,00%	90,00%				
																			Prekualifikasi Kinerja	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi				
	<b>PROGRAM PENYELANGSARAN STRUKTUR PEMERTAHAN UMUM</b>																			0,00%	94,00%	94,00	745.084.750	-16,37%	Kinlay
			91,00	4.054.216.000	0,00	102	788.448.000	114.500.000	254.080.000	354.084.750	20.940.000	-	-	-	-	-	-	-							



	Saldo Anggaran Pencapaian Pelaksanaan Dana dengan Pelaksanaan Dana	Luaran Dokumen Sektor/Program Penggunaan Dana dengan Pelaksanaan Dana (Dokumen)	0.000.000	0,00	2	0.075.000	2	4.725.000	-	-	-	-	-	-	4.725.000	90,00%	90,10%	0,00	4.725.000	9,00%	8,20%		Tidak Ada														
Sub-Rata Capaian Kinerja (%)																90,00%	90,40%																				
Predikat Kinerja																Sangat Tinggi	Sangat Tinggi																				
4.123.438.360																<b>TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM</b>	<b>85,98%</b>	<b>85,81%</b>																			
<b>PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM</b>																<b>Sangat Tinggi</b>	<b>Tinggi</b>																				

Faktor pendukung keberhasilan pencapaian kinerja

Faktor penghambat pencapaian kinerja

Tindak lanjut yang diperlukan dalam rencana berikutnya

Tindak lanjut yang diperlukan dalam RPTK berikutnya



No	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	81% <= 100%	Sangat Tinggi
2	70% <= 80%	Tinggi
3	60% <= 70%	Cukup
4	51% <= 60%	Rendah
5	<= 50%	Sangat Rendah

